

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI NASIONAL VI OPEN GOVERNMENT INDONESIA TAHUN 2021



Disusun oleh:

**Tim Sekretariat Nasional Open Government Indonesia**

**2021**

## DAFTAR ISI

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>4</b>
<b>Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi RAN OGI 2020-2022 Semester I dan II Tahun .....</b>	<b>4</b>
<b>SOROTAN CAPAIAN RAN OGI 2020-2022 SEMESTER I DAN II.....</b>	<b>9</b>
<b>I.    Komitmen dengan Capaian Administratif Baik dan Proses Kokreasi Aktif .....</b>	<b>9</b>
<b>II.   Komitmen dengan Capaian Administratif Kurang dan Proses Kokreasi Pasif .....</b>	<b>10</b>
<b>III.  Komitmen OGI dalam Upaya Pemulihan Pasca COVID-19 .....</b>	<b>11</b>
<b>CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I DAN II TAHUN 2021 .....</b>	<b>13</b>
<b>I.    Catatan Umum dan Tindak Lanjut Penetapan Target Capaian .....</b>	<b>13</b>
<b>II.   Catatan Umum dan Tindak Lanjut Implementasi Target .....</b>	<b>14</b>
<b>TUJUAN, TEMA, DAN KOMITMEN RAN OGI 2020-2022 .....</b>	<b>15</b>
<b>STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN .....</b>	<b>20</b>
<b>I.    Mekanisme Pelaksanaan RAN OGI .....</b>	<b>20</b>
<b>II.   Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAN OGI .....</b>	<b>20</b>
<b>1)  Pemantauan (<i>Monitoring</i>) .....</b>	<b>20</b>
<b>2)  Evaluasi .....</b>	<b>21</b>
<b>DESKRIPSI CAPAIAN PELAKSAAN RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I DAN II TAHUN 2021 .....</b>	<b>23</b>
<b>I. Berdasarkan Capaian Administratif Kementerian /Lembaga .....</b>	<b>23</b>
<b>II. Berdasarkan Capaian Administratif Organisasi Masyarakat Sipil .....</b>	<b>24</b>
<b>DESKRIPSI CAPAIAN 18 KOMITMEN RAN OGI 2020-2022 SEMESTER I DAN SEMESTER II .....</b>	<b>25</b>
Komitmen 1 .....	25
Komitmen 2 .....	32
Komitmen 3 .....	39
Komitmen 4 .....	44
Komitmen 5 .....	49
Komitmen 6 .....	54

Komitmen 7 .....	62
Komitmen 8 .....	67
Komitmen 9 .....	74
Komitmen 10 .....	81
Komitmen 11 .....	87
Komitmen 12 .....	93
Komitmen 13 .....	99
Komitmen 14 .....	105
Komitmen 15 .....	111
Komitmen 16 .....	117
Komitmen 17 .....	120
Komitmen 18 .....	124



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pemerintah Indonesia membentuk Open Government Indonesia (OGI) yang bertujuan untuk mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabilitas yang inklusif dalam tata kelola pemerintahan. OGI bersama Pemerintah dan Organisasi Masyarakat Sipil berkolaborasi melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target serta prioritas pembangunan nasional. Sekretariat Nasional OGI dibentuk untuk memfasilitasi pencapaian RAN (Rencana Aksi Nasional) OGI dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mengkonsolidasikan gerakan keterbukaan lainnya, baik yang di tingkat nasional maupun daerah.

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia meluncurkan rencana aksi keterbukaan pemerintah yang pertama. Pada tahun 2020, Rencana Aksi Nasional yang ke-6 untuk periode 2020-2022 telah disusun. Rencana Aksi tersebut melibatkan 21 Kementerian/Lembaga dengan 24 Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang bertanggung jawab melaksanakan 18 Komitmen dengan 267 Target Capaian. Sebagai salah satu upaya untuk menjamin tercapainya target RAN OGI 2020-2022, Sekretariat Nasional OGI melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi setiap semester selama periode implementasi RAN.

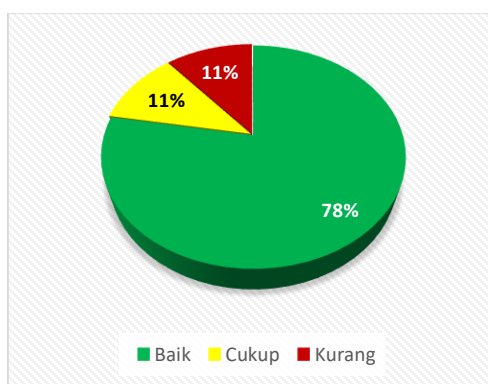
### Gambaran Umum Monitoring dan Evaluasi RAN OGI 2020-2022 Semester I dan II Tahun

Memasuki akhir tahun 2021, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan dua kali monitoring dan evaluasi RAN OGI 2020-2022. Adapun gambaran umum dari temuan monitoring dan evaluasi RAN OGI ialah sebagai berikut:

## 1. Capaian Administratif

Capaian administratif pelaksanaan RAN OGI Semester I dan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Capaian Administratif Pelaksanaan RAN OGI 2020-2022**  
**Semester I dan II Tahun 2021**



*Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester I dan II Tahun 2021*

- a. **78% komitmen** mendapat nilai **baik**, yang menunjukkan target capaian sudah dilakukan dengan optimal pada **14** komitmen, yaitu:

**Tabel 1.**  
Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Baik

No	Judul Komitmen
1	Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2	Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah
3	Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat
4	Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
5	Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan
6	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
7	Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban

8	Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-Program Kesehatan
9	Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
10	Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu
11	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data
12	Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19
13	Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat
14	Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

- b. **11% komitmen** mendapat nilai **cukup**, yang menunjukkan target capaian belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, dan membutuhkan penyelesaian dari masing-masing pelaksana pada **2** komitmen, yaitu:

**Tabel 2.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Cukup

No	Judul Komitmen
1	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!
2	Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum

- c. **11% komitmen** mendapat nilai **kurang**, yang menunjukkan pelaksana belum mampu menyelesaikan seluruh target capaian pada **2** komitmen, yaitu:

**Tabel 3.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Capaian Administratif Kurang

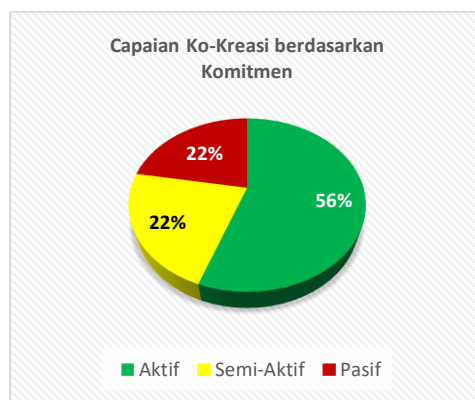
No	Judul Komitmen
----	----------------

1	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi
2	Keterbukaan Data Beneficial Ownership

## 2. Proses Ko-Kreasi

Proses Ko-kreasi pelaksanaan RAN OGI Semester I dan II tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Gambar 2**  
**Proses Ko-kreasi Pelaksanaan RAN OGI 2020-2022**  
**Semester I dan II Tahun 2021**



*Sumber: Monitoring dan Evaluasi Semester I dan II Tahun 2021*

- a. **56% komitmen** dengan capaian ko-kreasi aktif, yang menunjukkan baik Kementerian/Lembaga maupun OMS optimal berkolaborasi pada **10** komitmen:

**Tabel 4.**  
**Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Aktif**

No	Judul Komitmen
1	Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah
2	Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat



3	Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal
4	Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan
5	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum
6	Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban
7	Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-Program Kesehatan
8	Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa
9	Keterbukaan Data Beneficial Ownership
10	Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

- b. **22% komitmen** dengan capaian ko-kreasi semi-aktif, yang menunjukkan baik Kementerian/Lembaga maupun OMS belum sepenuhnya optimal berkolaborasi pada **4** komitmen:

**Tabel 5.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Semi Aktif

No	Judul Komitmen
1	Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
2	Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum
3	Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19
4	Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat

- c. **22% (4) komitmen** dengan capaian ko-kreasi pasif, yang menunjukkan baik Kementerian/Lembaga maupun OMS belum berkolaborasi pada **4** komitmen:

**Tabel 6.**

Daftar Komitmen dengan Nilai Proses Ko-Kreasi Pasif

No	Judul Komitmen
----	----------------

1	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!
2	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi
3	Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu
4	Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

## SOROTAN CAPAIAN RAN OGI 2020-2022 SEMESTER I DAN II

### I. Komitmen dengan Capaian Administratif Baik dan Proses Kokreasi Aktif

#### *Komitmen 5*

#### **MODEL INOVASI PELAYANAN PUBLIK UNTUK KELOMPOK MARJINAL**

#### *Aktor yang Terlibat:*

1. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
2. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama

#### **A. Capaian Administratif**

- Lembaga Administrasi Negara telah menyusun laporan pelaksanaan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marginal yang menjelaskan progres pelaksanaan laboratorium di 4 lokus kelompok marginal dengan 19 inovasi, yaitu:
  - Kabupaten Kepulauan Tanimbar: 5 inovasi
  - Kab. Lombok Utara: 7 inovasi
  - Kab. Tojo Una-Una: 5 inovasi
  - Kab. Sorong: 2 inovasi
- Lakpesdam PBNU telah melakukan pemetaan dan perumusan materi strategi pendampingan, dengan hasil:

- Terpetakan delapan klaster inovasi layanan untuk kelompok marjinal, yaitu: 1) Disabilitas; 2) Anak; 3) Perempuan; 4) Masyarakat Adat; 5) PMKS; 6) Masyarakat Pulau Terpencil; 7) Lansia; 8) Masyarakat Miskin
- Strategi pendampingan yang harus dilakukan berupa:
  - Pemetaan aktor-aktor yang bisa mendukung inovasi oleh OPD(Organisasi Perangkat Daerah) terkait
  - Sinergi sesama dinas terkait untuk mengatasi keterbatasan nomenklatur dan keterbatasan birokrasi lainnya
  - Kolaborasi dengan komunitas atau organisasi setempat untuk mencapai tujuan mutlak dilakukan agar inovasi layanan dapat mencapai tujuan.

#### **B. Proses Ko-Kreasi**

- LAN telah melibatkan Lakpesdam NU dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan diseminasi pada tahap *diagnose/design* kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah)
- Lakpesdam NU telah melakukan inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok marjinal dan merumuskan strategi pendampingannya.

### **II. Komitmen dengan Capaian Administratif Kurang dan Proses Kokreasi Pasif**

#### *Komitmen 10:*

#### **Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Akses Informasi**

##### *Aktor yang terlibat:*

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM
2. Komisi Informasi Pusat (KIP)
3. OMS Sektor Keadilan

#### **A. Capaian Administratif**

- BPHN Kemenkumham telah melakukan analisa dan kajian singkat yang hasilnya menunjukkan bahwa kasus sengketa informasi dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam salah satu jenis perkara baik litigasi dan/atau nonlitigasi. Namun sayangnya, BPHN tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait

- KIP telah menyusun data sengketa informasi yang sudah dimasukkan dalam Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2019 halaman 16 – 21, dengan jumlah permohonan sengketa sebanyak 2928 kasus sepanjang 2010-2019. Sedangkan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 2531 kasus sepanjang 2010-2019. Data sengketa ini menjadi salah satu bahan dalam kajian penanganan sengketa informasi BPHN Kemenkumham
- OMS Sektor Keadilan belum:
  - a. Memberikan data terkait jumlah perkara sengketa informasi yang didampingi oleh OMS baik pada tahap non-litigasi maupun litigasi
  - b. Terlibat dalam kajian terkait keperluan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi
  - c. melakukan perancangan pelatihan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi

#### **B. Proses Ko-Kreasi**

- BPHN belum melibatkan OMS Sektor Keadilan dalam proses identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan OMS Sektor Keadilan belum memberikan data perkara sengketa informasi sehingga kajian belum dapat dilanjutkan.
- KIP belum melibatkan OMS Sektor Keadilan dikarenakan OMS Sektor Keadilan tidak memberikan data bantuan hukum yang telah mereka berikan dalam proses sengketa informasi.
- OMS Sektor Keadilan belum bisa melibatkan BPHN dan KIP dalam membuat perancangan pelatihan bantuan hukum untuk sengketa informasi dikarenakan OMS Sektor Keadilan belum memulai perancangan pelatihan tersebut.

### **III. Komitmen OGI dalam Upaya Pemulihan Pasca COVID-19**

#### *Komitmen 1*

#### **Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

##### *Aktor yang terlibat:*

1. Komisi Informasi Pusat (KIP)
2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
3. Indonesia Corruption Watch (ICW)

**A. Capaian Administratif**

- KIP telah menerbitkan dan melaksanakan sosialisasi terkait revisi PERKI SLIP, yaitu PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP yang menjelaskan secara rinci terkait informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan, berkoordinasi dengan LKPP dan ICW.
- KIP telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Daerah telah dilakukan
- KIP telah menyusun Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 dengan nilai 72,06 (kualitas sedang), yang mana keterbukaan informasi barang dan jasa masuk dalam kuesioner nomor 57 – sub indikator B.7. Transparansi berada di bawah dimensi Lingkungan dan Ekonomi.
- LKPP telah mengeluarkan Keputusan PPID Nomor 3 dan 4 Tahun 2021 sebagai tindak lanjut PERKI SLIP 2021. Dalam peraturan tersebut, LKPP menekankan adanya keterbukaan informasi barang dan jasa yakni perlunya publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP); Dokumen Persiapan termasuk HPS, KAK, Spesifikasi teknis, gambar, dan rancangan kontrak; Berita Acara termasuk kaji ulang, evaluasi penawaran, klarifikasi, evaluasi kualifikasi, hasil prakualifikasi, dan hasil pemilihan; Dokumen penawaran peserta lelang termasuk surat penawaran, penawaran harga, dan isian kualifikasi.
- Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat yang sudah dilakukan berupa pembuatan *mockup* pencatatan pengadaan darurat pada aplikasi SPSE
- Capaian target ICW :
  - Telah melakukan sosialisasi PERKI No. 1 Tahun 2021
  - belum memberikan laporan atau kajian terkait masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi
  - belum bisa terlibat dalam pengembangan portal pengadaaan darurat.

**B. Proses Ko-Kreasi**

- KIP telah melibatkan ICW dalam menyusun PERKI No. 1 Tahun 2021 untuk memberikan masukan serta menyusun IKIP 2021 sebagai narasumber umum
- LKPP tidak melibatkan ICW dalaam penyusunan Keputusan PPID guna memperkuat PERKI No. 1 Tahun 2021 serta dalam pengembangan portal pengadaan nasional.



## CATATAN UMUM DAN TINDAK LANJUT RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I DAN II TAHUN 2021

Pelaksanaan RAN OGI 2020-2022 memberikan pembelajaran penting bagi seluruh aktor Pemerintah maupun OMS sebagai pelaksana, dan bagi Sekretariat Nasional OGI sebagai pihak yang memberikan pendampingan serta melaksanakan Monitoring dan Evaluasi. Pada bagian ini, pembelajaran-pembelajaran tersebut akan dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Refleksi Target Capaian, Refleksi bagi Pelaksana, dan Refleksi bagi Sekretariat OGI. Berikut poin-poin refleksi yang didapatkan dalam pelaksanaan RAN OGI 2020-2022 Semester I dan II:

### I. Catatan Umum dan Tindak Lanjut Penetapan Target Capaian

Dalam dokumen RAN OGI 2020-2022, Target Capaian bermakna sebagai tindakan atau kegiatan yang perlu dilakukan oleh aktor Pemerintah maupun OMS dalam melaksanakan masing-masing komitmennya. Target Capaian dalam RAN OGI dibagi ke dalam empat bagian, yaitu Target Capaian Semester I (B06), Semester I (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (24). Dalam pelaksanaannya sampai dengan Semester 2, terdapat beberapa refleksi dalam penetapan target yang ditemukan, yaitu:

- Beberapa Target Capaian belum memenuhi prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-based*), sehingga belum bisa secara langsung menyangar ukuran keberhasilan untuk dicapai pada tahun 2022.
- Kriteria penilaian ketercapaian target secara kualitatif maupun kuantitatif belum ditentukan, sehingga belum ada standar yang sama untuk melakukan penilaian.
- Indikator *outcome/impact* dari setiap komitmen belum ditetapkan.

Berdasarkan temuan atas Target Capaian tersebut, maka terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu dilaksanakan untuk menghasilkan pelaksanaan yang lebih baik, yaitu:

- Penetapan target RAN selanjutnya diharapkan memenuhi kriteria prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Based*), yaitu:

- Pengkonkritan target-target dengan redaksional proses menjadi output atau minimal proses dengan kesepakatan kriteria capaian yang lebih berkualitas
- Pendetailan target-target untuk memperjelas peran atau tanggung jawab antara Kementerian/Lembaga dan OMS yang menjadi pelaksana
- Dilaksanakannya penetapan kriteria ketercapaian kualitatif dan kuantitatif yang lebih terukur untuk masing-masing Target Capaian, yaitu:
  - Kriteria penilaian kualitatif:
    - Tahapan/proses lengkap pencapaian target tersebut
    - Hasil sebuah target tercapai secara lengkap atau sempurna
  - Kriteria penilaian kuantitatif:
    - Persentase menggambarkan capaian tahapan/proses dari target tersebut
    - Persentase menggambarkan capaian hasil dari target tersebut.
- Menetapkan kriteria evaluasi berbasis *outcome / impact* sehingga capaian komitmen dapat diukur pada level dampak yang lebih luas terutama kontribusi pada nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya

## II. Catatan Umum dan Tindak Lanjut Implementasi Target

Dalam RAN OGI 2020-2022, secara garis besar implementasi target dilakukan oleh dua pelaksana, yaitu Pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Masing-masing instansi tersebut memiliki sejumlah Target Capaian yang perlu dilaksanakan dan dicapai setiap semesternya. Pada Monitoring Evaluasi RAN OGI 2020-2022 Semester I dan II, terdapat sejumlah catatan umum yang perlu diperhatikan oleh masing-masing pelaksana dalam mengimplementasikan target yang telah ditentukan, yaitu:

- Belum maksimalnya komitmen beberapa Kementerian/Lembaga maupun OMS untuk melaksanakan RAN OGI, terutama bagi OMS. Hanya terdapat 20 Kementerian/Lembaga dan 13 OMS yang aktif melaksanakan

komitmennya, dari 21 Kementerian Lembaga dan 24 OMS yang terdaftar sebagai mitra OGI.

- Proses ko-kreasi atas inisiatif Kementerian/Lembaga maupun OMS belum optimal.
- Adanya keterbatasan sumber daya di Kementerian/Lembaga maupun OMS terutama mengenai realokasi anggaran akibat pandemi COVID-19. Keterbatasan sumber daya meliputi:
  - Pemotongan anggaran / refocusing biaya baik dari Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil.
  - Point of Contact yang terdampak Pandemi COVID-19
  - Pertukaran Point of Contact yang berdampak pada terhambatnya koordinasi

Berdasarkan temuan atas Pelaksana tersebut, maka terdapat beberapa tindak lanjut yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana dalam mengimplementasikan RAN OGI, yaitu:

- Dilakukannya penguatan komitmen antar Kementerian/Lembaga dan OMS dalam melaksanakan RAN OGI secara lebih berkualitas, berkesinambungan, dan berdampak.
- Aktualisasi proses ko-kreasi Kementerian/Lembaga maupun OMS.
- Optimalisasi strategi pendampingan dan monitoring oleh Sekretariat Open Government Indonesia.

## TUJUAN, TEMA, DAN KOMITMEN RAN OGI 2020-2022

Dalam rangka mendorong implementasi nilai-nilai keterbukaan pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Pemerintah Indonesia berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide dan aksi praktik keterbukaan pemerintah melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Keterbukaan Pemerintah/Open Government Indonesia (OGI) periode 2020-2022.

Tema besar RAN OGI periode 2020-2022 disesuaikan dengan kondisi Indonesia yang sedang menghadapi pandemi Covid 19, yaitu Pemulihan Pasca-Pandemi COVID-

19 yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi COVID-19. Tema besar ini bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 yang memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial.” Dalam tema besar ini, ada beberapa isu strategis yang didorong yakni penguatan pelayanan publik, antikorupsi, transparansi fiskal, akses terhadap keadilan, partisipasi masyarakat, dan kebijakan publik berspektif gender. Tabel berikut menjelaskan 18 komitmen beserta Kementerian/Lembaga dan OMS pelaksananya:

**Tabel 7.**  
Daftar Komitmen beserta Pelaksananya

No	Komitmen	Kementerian/Lembaga dan OMS
1	Komitmen 1: Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Komisi Informasi Pusat (KIP) Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ICW
2	Komitmen 2: Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) PATTIRO Seknas FITRA
3	Komitmen 3: Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS Medialink PWYP TII
4	Komitmen 4: Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yayasan TIFA

5	Komitmen 5 : Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal	Lembaga Administrasi Negara (LAN) Lakpesdam NU
6	Komitmen 6 : Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	Mahkamah Agung Kejaksaan Agung Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM Polisi RI OMS Sektor Keadilan: IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, PBHI, YLBHI
7	Komitmen 7 : Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum	Mahkamah Agung BPHN Kementerian Hukum dan HAM OMS Sektor Keadilan: IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, PBHI, YLBHI
8	Komitmen 8: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	BPHN Kementerian Hukum dan HAM OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
9	Komitmen 9: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	BPHN Kementerian Hukum dan HAM OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH



		APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI (-)
<b>10</b>	Komitmen 10: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi	BPHN Kementerian Hukum dan HAM Komisi Informasi Pusat OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI (-)
<b>11</b>	Komitmen 11: Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan	Kementerian Sosial Medialink
<b>12</b>	Komitmen 12: Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa	Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) OMS: Seknas FITRA, TII, WVI, Kapal Perempuan, INFID, Medialink, Yappika (Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi)
<b>13</b>	Komitmen 13: Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Perludem
<b>14</b>	Komitmen 14: Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data	Kementerian Kesehatan (Kemenkes) INFID

15	Komitmen 15: Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19	Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Seknas FITRA
16	Komitmen 16: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat	Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) OMS Sektor Keadilan: PBHI, IJRS, Asosiasi LBH APIK Indonesia, LBH APIK Jakarta, LBH Bandung, LBH Jakarta, LBH Papua, LBH Masyarakat, YLBHI
17	Komitmen 17: Keterbukaan Data Beneficial Ownership	Stranas PK PWYP
18	Komitmen 18: Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS OMS: Asosiasi LBH APIK Indonesia, IJRS, YLBHI, SAFEnet

## STRATEGI PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

### I. Mekanisme Pelaksanaan RAN OGI

Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) merupakan dua pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan RAN OGI. Dalam pelaksanaan RAN OGI 2020-2022, terdapat 21 Kementerian/Lembaga dan 24 OMS yang memiliki sejumlah target capaian yang perlu untuk dilaksanakan dan dilaporkan setiap semesternya kepada Sekretariat Nasional OGI.

Pelaporan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan selaras dengan ukuran keberhasilan serta target capaian yang telah ditetapkan dalam dokumen RAN OGI 2020-2022. Lebih dari itu, diharapkan, dalam pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, Pemerintah bersama dengan OMS dapat mengerjakannya dengan mengedepankan proses ko-kreasi, sebagai bentuk kolaborasi antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil.

Memasuki periode pelaporan, Pemerintah dan OMS akan memberikan Data Dukung terkait pelaksanaan komitmen melalui dua kanal yang berbeda, yaitu:

- i. SISMONEV Kantor Staf Presiden - bagi Kementerian/Lembaga
- ii. SISMONEV OGI - bagi OMS

### II. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan RAN OGI

Dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan, Monitoring dan Evaluasi merupakan salah satu dari proses tersebut yang perlu menjadi perhatian. Sekretariat Nasional OGI, sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan keberjalanan implementasi, memiliki tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi RAN OGI 2020-2022. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan waktu Target Capaian, yaitu Semester I (B06), Semester II (B12), Semester III (B18), dan Semester IV (B24). Hingga dokumen ini diterbitkan, Sekretariat Nasional OGI telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi bagi Target Capaian Semester I dan Semester II. Adapun penjelasan terkait kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan akan dijelaskan pada bagian berikut.

#### 1) Pemantauan (*Monitoring*)

Sekretariat Nasional OGI bertugas untuk melaksanakan pemantauan (*monitoring*) secara intensif pada akhir semester berjalan dengan cara:

- Mempelajari laporan data dukung capaian target semester Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil;
- Melakukan konfirmasi apabila dinilai terdapat data dukung maupun hal-hal lainnya yang kurang jelas atau perlu dilengkapi oleh Kementerian Lembaga/ Organisasi Masyarakat Sipil.

Mekanisme pemantauan akan dijalankan oleh Sekretariat Nasional OGI sepanjang waktu target capaian berjalan, hingga pada periode monitoring dan evaluasi RAN OGI 2020-2022 setiap semesternya.

## 2) Evaluasi

Sekretariat Nasional OGI melaksanakan evaluasi terhadap capaian target yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam memberikan penilaiannya, Sekretariat Nasional OGI tidak hanya melakukan penilaian secara administratif, tetapi juga kualitas pelaksanaan yang meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Memastikan rencana aksi yang dilaporkan memang telah dilaksanakan (tidak sekedar administratif);
- b. Memastikan rencana aksi dilaksanakan dengan kualitas yang baik;
- c. Memastikan rencana aksi akan berkesinambungan;
- d. Memastikan para pelaksana menyadari bahwa rencana aksi membawa perubahan (*output-outcome*);
- e. Memastikan rencana aksi telah mencapai perubahan (*dampak/impact*) tidak hanya bagi pelaksana tapi juga penerima manfaat (masyarakat luas).

Untuk pelaksanaan sampai dengan Semester 2 tahun 2021, Sekretariat Nasional OGI fokus pada evaluasi pada poin “a” dan “b”. Namun untuk tahun berikutnya, dalam hal ini tahun 2022, Sekretariat Nasional OGI juga akan fokus pada poin “c”, “d”, dan “e”.

Dalam melaksanakan evaluasi hingga Semester 2 tahun 2021, Sekretariat melakukan analisis yang terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

- a. **Melakukan identifikasi capaian target**, termasuk hambatan yang dialami oleh masing-masing komitmen, mulai dari Ukuran Keberhasilan, hingga Target Capaian masing-masing semester;
- b. **Melakukan identifikasi Ko-kreasi** serta **Target Semester yang belum terselesaikan**. Sekretariat Nasional OGI akan menganalisis kegiatan Ko-kreasi yang dilakukan masing-masing pelaksana, serta meninjau kembali pelaksanaan target capaian yang tidak dapat diselesaikan pada periode sebelumnya.

Dalam proses evaluasi RAN OGI 2020-2022, Sekretariat Nasional OGI memberikan beberapa penilaian dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1. Penilaian Capaian Administratif

Salah satu komponen penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI ialah penilaian **Capaian Administratif**. Penilaian ini bermakna untuk mengukur hasil kinerja Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan target-target komitmen. Adapun kriteria penilaian pada bagian ini terdiri atas beberapa hal sebagai berikut:

Skala Nilai	Keterangan
70-100	Baik
51-69	Cukup
0-50	Kurang
N/A	<i>Not Available*</i>

\*Target tidak dapat diukur pelaksanaannya karena membutuhkan *support* dari pelaksana lainnya

### 2. Penilaian Proses Ko-kreasi

Sebagai salah satu mandat dalam pelaksanaan RAN, Sekretariat Nasional OGI menjadikan **Proses Ko-kreasi** sebagai salah satu komponen penilaian. Komponen ini menjelaskan sejauh mana ko-kreasi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dengan Organisasi Masyarakat Sipil dalam melaksanakan komitmen RAN OGI. Adapun kriteria penilaian proses ko-kreasi ialah sebagai berikut:



	Aktif
	Semi-Aktif
	Pasif
	Tidak bisa dilaksanakan, karena bergantung pada pelaksana lainnya

### 3) Pelaporan

Penyusunan laporan yang dilakukan oleh Sekretariat Nasional OGI setiap akhir semester, memberikan penekanan maupun sorotan baik secara kualitatif dan kuantitatif terhadap tiga hal, yaitu:

- Capaian Administratif
- Proses Ko-kreasi
- Refleksi

#### DESKRIPSI CAPAIAN PELAKSANAAN RAN OGI 2020-2022: SEMESTER I DAN II TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan RAN OGI 2020-2022, terdapat 18 komitmen dengan 267 Target Capaian yang perlu dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Pada pelaksanaannya hingga semester dua, terdapat 131 Target Capaian yang telah dikerjakan oleh Kementerian/Lembaga dan OMS. Adapun hasil capaian dari target tersebut ialah sebagai berikut:

#### I. Berdasarkan Capaian Administratif Kementerian /Lembaga

Adapun rincian capaian administratif B06, B12, dan akumulasi keseluruhan K/L ialah sebagai berikut:

**Tabel 8. Capaian Administratif Semester I dan II Tahun 2021**

Indikator	B06	B12	Akumulasi Tahun 2021
Baik (70-100)	26	33	59
Cukup (51-69)	0	0	0

Kurang (0-50)	7	4	11
Kinerja tidak dapat dinilai (N/A)	2	1	3
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>73</b>

Sehingga akumulasi capaian administratif 73 target K/L di tahun 2021, yaitu:

1. 81 % (59 target) memiliki kinerja baik
2. 15% (11 target) memiliki kinerja kurang
3. 4 % (3 target) memiliki penilaian N/A

## II. Berdasarkan Capaian Administratif Organisasi Masyarakat Sipil

Adapun rincian capaian administratif B06, B12, dan akumulasi keseluruhan OMS ialah sebagai berikut:

**Tabel 9. Capaian Administratif Semester I dan II Tahun 2021**

Indikator	B06	B12	Akumulasi Tahun 2021
Baik (70-100)	17	22	39
Cukup (51-69)	0	0	0
Kurang (0-50)	8	4	12
Kinerja tidak dapat dinilai (N/A)	4	3	7
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>58</b>

Sehingga akumulasi capaian administratif 58 target OMS di tahun 2021, yaitu:

1. 67 % (39 target) memiliki kinerja baik
2. 21% (12 target) memiliki kinerja kurang
3. 12 % (7 target) memiliki penilaian N/A

**DESKRIPSI CAPAIAN 18 KOMITMEN RAN OGI 2020-2022  
SEMESTER I DAN SEMESTER II**

**Komitmen 1**

**Mendorong Keterbukaan Kontrak di Sektor Pengadaan Barang dan  
Jasa Pemerintah**

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Diterbitkannya revisi PERKI SLIP (Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik) yang salah satu bagiannya mengatur keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.		
<b>Komisi Informasi Pusat (KIP)</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Diterbitkannya dokumen peraturan yang merupakan revisi PERKI SLIP.	Telah terbit peraturan revisi PERKI SLIP, yaitu PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP yang mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.	
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Aktif</b>
	Dalam proses penyusunan PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP, Komisi Informasi Pusat (KIP) secara aktif berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW). ICW terlibat mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan.	
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p>1. Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Badan Publik terutama Kementerian/ Lembaga (K/L).</p> <p>2. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.</p>	<p>1. Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP (PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang SLIP) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali secara daring.</p> <p>2. Setelah PERKI 1/2021 diterbitkan, KIP telah aktif mengundang Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan badan publik untuk mensosialisasikan peraturan tersebut, agar badan publik dapat membuka data sesuai dengan ketentuan dalam PERKI1/2021. Sosialisasi ini dilakukan bertahap, pertama pada badan publik meliputi K/L, dan Pemerintah Daerah. Kedua, sosialisasi dilakukan pada pihak eksternal yakni BUMN, Perguruan Tinggi, Partai Politik, Komisi Informasi Daerah, dan OMS.</p> <p>3. Materi sosialisasi sudah menekankan informasi detail pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan, yang sudah ditayangkan juga secara online pada saluran youtube KIP.</p> <p>4. Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa bagi Pemerintah Daerah telah dilakukan ketika sosialisasi PERKI 1/2021. Kementerian Dalam Negeri sebagai peserta sosialisasi juga diharapkan dapat aktif mendorong keterbukaan di level daerah sesuai dengan PERKI 1/2021.</p>	
<b>Indonesia Corruption Watch (ICW)</b>		
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Sosialisasi telah dilakukan pada OMS.</p>	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Sosialisasi peraturan revisi PERKI SLIP pada Publik.	ICW telah melakukan sosialisasi PERKI 1/2021 dalam agenda pelatihan ICW di tahun 2021.	
	<b>Proses Kokreasi :</b>  ICW telah melakukan sosialisasi PERKI 1/2021 dalam agenda pelatihan ICW di tahun 2021. ICW juga aktif mendiseminasikan melalui tulisan misalnya <a href="https://www.antikorupsi.org/index.php/id/article/dokumen-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-adalah-informasi-publik">https://www.antikorupsi.org/index.php/id/article/dokumen-kontrak-pengadaan-barang-dan-jasa-adalah-informasi-publik</a>	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi yang salah satu indikatornya terkait keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa.		
<b>ICW</b>		
<b>Target B06:</b>  Memberikan bantuan dalam menjaring masukan atas opini publik.	<b>Capaian Target:</b>  ICW belum memberikan laporan atau kajian terkait masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi.	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Kokreasi :</b>  Tidak melaksanakan penjangkaran masukan publik terkait Indeks Keterbukaan Informasi.	<b>Pasif</b>
<b>KIP</b>		
<b>Target B12:</b>  Tersusunnya Indeks Keterbukaan Informasi.	<b>Capaian Target:</b>  1. Penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) telah dilakukan sepanjang 2020-2021. 2. IKIP 2021 sebesar 71,37, berada pada kategori berkualitas “sedang”, yang terbangun atas 3 indikator:	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian tertinggi pada Lingkungan Hukum, yaitu 'jaminan hukum atas akses informasi' sebesar 79,15.</li> <li>b. Penilaian terendah pada Lingkungan Ekonomi, yaitu 'transparansi' sebesar 65,10.</li> <li>c. Sedangkan untuk Lingkungan Fisik dan Politik, yaitu 'literasi publik' sebesar 65,95 serta 'partisipasi publik' sebesar 67,29.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berdasarkan daerah, IKIP 2021 menempatkan Provinsi Bali pada peringkat pertama provinsi dengan keterbukaan informasi publik 'baik', sedangkan Provinsi Papua Barat pada peringkat akhir provinsi dengan keterbukaan informasi publik 'buruk'.</li> <li>4. Berdasarkan karakteristik informan yang disurvei, menunjukkan penilaian tertinggi diberikan oleh informan badan publik negara atau pemerintah, sedangkan informan masyarakat dan pelaku usaha memberikan penilaian terendah pada keterbukaan informasi publik.</li> <li>5. IKIP 2021 memiliki indikator transparansi dalam bidang dunia usaha yang memiliki sub indikator yakni: pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Menurut hasil IKIP, Aceh menjadi salah satu daerah yang memiliki skor baik di bidang ini. Indikator transparansi skor Aceh dalam bidang dunia usaha termasuk kategori situasi baik dengan dua sub indikator: a) tingkat pemerintah daerah terbuka atas rencana-rencana kebijakan ekonomi dengan skor 82,33; dan b) pengelolaan anggaran publik dan badan publik menerapkan prinsip keterbukaan atas pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan skor 84,89.</li> </ol>	
--	--	--

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	6. Tidak ada rekomendasi khusus pada LKPP dan pemerintah daerah terkait keterbukaan informasi publik pengadaan barang dan jasa.	
	<b>Proses Kokreasi:</b> KIP telah melibatkan ICW dalam penyusunan IKIP 2021 sebagai narasumber umum, namun tidak khusus dalam hal memberikan masukan terkait metodologi IKIP.	<b>Semi Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP.		
<b>LKPP</b>		
<b>Target B06:</b> Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa termasuk dalam kondisi darurat.	<b>Capaian Target:</b> Telah terlaksana persiapan pengembangan <i>mockup</i> portal untuk pencatatan pengadaan dalam kondisi darurat. Portal tersebut akan berisi informasi tentang: Nama Paket, Instansi, Tanggal Pembuatan Paket, Metode Pengadaan, Jenis Pengadaan, Tahun Anggaran, Pagu Anggaran, dan Penyedia Berkontrak. Portal ini dijadwalkan akan selesai pada bulan Desember 2021.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Tidak terjadi koordinasi antara ICW dan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.	<b>Pasif</b>
<b>ICW</b>		
<b>Target B06:</b> Koordinasi dengan LKPP	<b>Capaian Target:</b> ICW tidak dapat melaksanakan target karena tidak adanya koordinasi dari LKPP untuk melakukan	<b>Nilai: N/A</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat Nasional.	<p>rapat pembahasan pengembangan portal Pengadaan Barang dan Jasa dalam kondisi darurat nasional.</p> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>ICW tidak dilibatkan oleh LKPP untuk berkoordinasi.</p>	
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai:</b>
Koordinasi dengan LKPP mengenai persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.	ICW telah melaksanakan target dengan mengadakan rapat dengan LKPP terkait pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa pada 8 September 2021.	<b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Aktif</b>
	Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa ICW masih belum bisa terlibat dalam pengembangan portal pengadaan darurat.	
<b>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)</b>		
<b>Target (1) B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 90%</b>
Peraturan yang dibuat oleh LKPP sebagai tindak lanjut revisi PERKI SLIP (apabila terdapat perubahan yang perlu ditindaklanjuti)	1. Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Keputusan PPID LKPP 3/2021) dan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi	

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

dalam peraturan LKPP dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa).	<p>Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 4 Tahun 2021 tentang Pengubahan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Terhadap Penetapan PPID LKPP No. 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2021 (Keputusan PPID LKPP 4/2021) masih berupa draft.</p> <p>2. Draft Peraturan ini telah memberikan daftar informasi dan data terkait PBJ yang wajib dan dikecualikan untuk dibuka pada publik, sesuai dengan PERKI 1/ 2021. Draft ini rencananya akan diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2021.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Tidak melibatkan ICW.</p>	<b>Pasif</b>
<p><b>Target (2) B12:</b></p> <p>Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Persiapan yang dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan informasi kebutuhan terkait pengembangan pencatatan pengadaan darurat.</li> <li>2. Pembuatan mockup pencatatan pengadaan darurat pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).</li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Pengembangan portal untuk pencatatan pengadaan darurat tidak dilakukan bersama dengan ICW karena pengembangan teknis tampilan website berada di ranah internal.</p>	<b>Pasif</b>
<b>Tindak Lanjut</b>		

**UK 1:**

1. Untuk memastikan pemahaman yang baik dari para Badan Publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) dan OMS sosialisasi dan koordinasi perlu dilakukan secara rutin dengan materi dan metode yang baik.
2. Kokreasi berjalan dengan baik karena KIP telah melibatkan ICW dalam sosialisasi dan ICW juga sudah mensosialisasikan PERKI 1/2021, baik dalam agenda pelatihan ICW maupun postingan di website ICW.

**UK 2:**

KIP, LKPP, dan ICW perlu menindaklanjuti hasil penilaian indikator keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa IKIP 2021 guna memperbaiki kualitas keterbukaan informasi pengadaan barang dan jasa pada tingkat pusat maupun daerah.

**UK 3:**

1. Draft peraturan LKPP guna memperkuat PERKI 1/2021 yang telah mendetailkan informasi pengadaan barang dan jasa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, mulai dari tahap perencanaan, pemilihan, hingga pelaksanaan serta bisa segera dilegalisasikan menjadi Peraturan LKPP.
2. Persiapan final pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat perlu dipastikan telah siap diimplementasikan sebagai portal pada B18.
3. Proses kokreasi antara LKPP dan ICW perlu dikonkritkan.

**Komitmen 2**

**Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik Melalui SP4N-LAPOR!**

**Ukuran Keberhasilan 1:**

Laporan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! ditindaklanjuti (target tingkat penyelesaian minimal 45% dari jumlah pengaduan pada tahun 2022).

**Kementerian PAN RB**

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



melalui SP4N-LAPOR!- yang telah ditindaklanjuti sebanyak 40%.	disabilitas terkait penggunaan SP4N-LAPOR. 2. Terkait jumlah laporan yang ditindaklanjuti, Kementerian PAN RB berhasil memenuhi jumlah laporan yang ditindaklanjuti dengan nilai sebesar 83% dari jumlah aduan yang diterima. Nilai yang ditindaklanjuti ini terdiri dari: 2% Laporan yang sedang dalam proses; 32% Laporan yang telah selesai; dan 49% Laporan yang telah diarsipkan.	
	<b>Proses Kokreasi:</b> PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana.	<b>Pasif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh instansi pemerintah (30% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 45% laporan di tahun 2022).		
<b>Kementerian PAN RB</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Surat Menteri PAN RB untuk <b>evaluasi</b> pengelolaan SP4N-LAPOR!. 2. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan LAPOR!.	<b>Capaian Target:</b> 1. Surat Menteri PAN RB telah dikirimkan kepada seluruh Pemerintah Daerah yang terhubung dengan SP4N-LAPOR!. 2. Kementerian PAN RB telah melakukan pendampingan di: (1) Aceh; (2) Kalimantan Timur; (3) Maluku Utara; (4) NTT; (5) Sulawesi Tenggara; (6) Sulawesi Selatan; (7) Kalimantan Utara; dan (8) Bali. Pendampingan dilakukan berdasarkan hasil Monev 2020, sehingga pemilihan instansi dilakukan berdasarkan performa pengelolaan. <b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
		<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	Kementerian PAN RB telah melakukan kokreasi dengan OMS, tetapi belum melibatkan PATTIRO dalam proses kokreasi tersebut.	
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
1. Pendampingan pengelolaan pengaduan ke K/L/D yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.	1. Kementerian PAN RB telah melakukan pendampingan ke (1) Sulawesi Selatan; (2) Bangka Belitung; (3) Kalimantan Tengah; (4) Kota Palangkaraya; dan (5) Provinsi Bali. Pelatihan dilakukan baik sebagai bentuk Monev, Bimbingan Teknis, serta Training Operator pengelola SP4N-LAPOR di daerah.	
2. Peningkatan kinerja pengelolaan SP4N-LAPOR! oleh lembaga pemerintah (25% instansi pemerintah menindaklanjuti minimal 40% laporan di tahun 2021).	2. Jumlah K/L/D yang berhasil menindaklanjuti laporan sebesar 70% atau 1.216 unit penyelenggara. Dengan jumlah Unit Penyelenggara yang berhasil menindaklanjuti sebesar 100% berjumlah 837 Unit Penyelenggara.	
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Pasif</b>
	Kementerian PAN RB dengan PATTIRO belum melakukan kokreasi terkait ukuran keberhasilan ini. Hal tersebut dibuktikan dari tidak adanya data yang mendukung bentuk kokreasi yang dilakukan antara PATTIRO dengan Kementerian PAN RB.	
<b>PATTIRO</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai:</b>
1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan	PATTIRO tidak melaksanakan pendampingan serta sosialisasi.	<b>0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Pasif</b>
	PATTIRO tidak mengumpulkan data dukung, namun telah memberikan informasi bahwa pada	

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p>SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-LAPOR! kepada masyarakat.</p>	<p>semester 1 belum bisa melakukan kegiatan secara optimal karena keterbatasan dana.</p>	
<p><b>Target B12:</b></p> <p>1. Pendampingan Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan SP4N-LAPOR! untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyampaian aduan.</p> <p>2. Sosialisasi terkait pemanfaatan SP4N-</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>PATTIRO belum melaksanakan pendampingan secara langsung, tetapi sudah melakukan pemetaan terkait layanan pelaporan pengaduan pelayanan publik yang sudah terhubung dengan SP4N-LAPOR!.</p> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>PATTIRO belum berkoordinasi secara langsung terkait pendampingan dan sosialisasi dengan Kementerian PAN RB. Namun telah melaksanakan rapat awal terkait strategi sosialisasi.</p>	<p><b>Nilai:</b></p> <p><b>50%</b></p> <p><b>Pasif</b></p>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

LAPOR! kepada masyarakat.		
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Terbukanya rekapitulasi laporan data dan informasi terkait pengaduan publik.		
<b>Kementerian PAN RB</b>		
<b>Target B06:</b> Rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	<b>Capaian Target:</b> 1. Rapat koordinasi sudah dilakukan dengan USAID dan Detech. 2. Informasi yang sudah dibuka: (1) Statistik performa instansi; (2) Kategori laporan; (3) Wilayah laporan; dan (4) Klasifikasi laporan.	<b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Rapat pengembangan fitur laporan data dan informasi belum melibatkan OMS, termasuk PATTIRO.	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> Pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	<b>Capaian Target:</b> Belum ada pembahasan secara khusus terkait pengembangan lapor dalam Rekapitulasi Laporan Data dan Informasi terkait pengaduan publik.	<b>30%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Tidak ada proses kokreasi yang dilakukan antara Kementerian PAN RB dengan unsur Organisasi Masyarakat Sipil.	<b>Pasif</b>
<b>PATTIRO</b>		
<b>Target B06:</b> Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data	<b>Capaian Target:</b> PATTIRO belum terlibat dalam pembahasan fitur laporan data dan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	<b>Nilai:</b> <b>0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	PATTIRO belum diundang dalam rapat pembahasan pengembangan fitur laporan data dan informasi yang ingin dibuka.	
<b>Target B12:</b> Keterlibatan dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik.	<b>Capaian Target:</b> Kementerian PAN RB belum mengundang PATTIRO untuk terlibat langsung dalam rapat koordinasi pengembangan fitur laporan data dan informasi terkait pengaduan pelayanan publik.	<b>Nilai:</b> <b>0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> PATTIRO belum diundang dalam rapat pembahasan pengembangan fitur laporan data dan informasi yang ingin dibuka.	<b>Pasif</b>
<b>Tindak Lanjut:</b> <b>UK 1:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dibuat dan disepakati kriteria penyelesaian pengaduan melalui SP4N-LAPOR berbasis kualitas.</li> <li>2. Komitmen proses kokreasi Kementerian PAN RB maupun PATTIRO harus lebih diperkuat.</li> </ol> <b>UK 2:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksekusi pengembangan fitur laporan data dan informasi yang terbuka terkait pengaduan publik perlu segera dilaksanakan.</li> <li>2. Komitmen proses kokreasi Kementerian PAN RB maupun PATTIRO harus lebih diperkuat.</li> </ol>		

### Komitmen 3

#### Pengembangan Rencana Aksi Tata Kelola Data di Tingkat Pemerintah Daerah

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Mendorong adanya rencana aksi Satu Data Indonesia di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.		
<b>Kementerian PPN / BAPPENAS</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dilakukan dalam bentuk kunjungan langsung ke daerah untuk memberikan masukan terkait pengembangan rencana aksi di Kota Semarang, Kab. Banggai, Kab. Sumbawa Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Seknas OGI. Dalam hal ini, Sekretariat SDI mengunjungi Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi NTB. Hasil kunjungan berupa asesmen awal terkait kesiapan Pemerintah Daerah dalam rencana aksi Satu Data Daerah, yang kemudian ditelaah lebih lanjut dalam asesmen lanjutan di B12.	
	<b>Proses Kokreasi:</b>  1. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat SDI kedepannya diharapkan mengedepankan proses kokreasi untuk daerah Riau, NTB, dan Jawa Timur.  2. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat OGI telah melibatkan OMS untuk daerah Provinsi NTB, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



Pendampingan dalam pembentukan rencana aksi di tingkat daerah melalui pilot project di beberapa daerah Provinsi NTB, Riau, Jawa Timur, Kota Semarang, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	Pendampingan dilakukan dalam bentuk:	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat SDI melakukan asesmen untuk menilai kesiapan daerah dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI. Hasil asesmen tersebut digunakan sebagai dasar menyusun rencana aksi Satu Data di masing-masing daerah.</li> <li>2. Asesmen tersebut menekankan pada 7 aspek kesiapan daerah meliputi adanya penyusunan regulasi penyelenggaraan SDI daerah, manajemen data, pengelolaan portal, hingga kesiapan data dan infrastruktur untuk Integrasi Portal Daerah ke Portal SDI. Dari segi 7 aspek tersebut, Kota Semarang menunjukkan kesiapan yang paling baik karena hampir semua aspek telah dipenuhi.</li> <li>3. Sebagai bagian dari persiapan ini, Pemda Riau dan Media Link melakukan mini workshop penyusunan standarisasi data sektoral pada 7 daerah pilot project—yang menjelaskan Standarisasi Data, Integrasi Data Pusat dan Daerah dalam Skema SDI. Hal serupa juga dilakukan oleh pemda lainnya bersama OMS misalnya Provinsi NTB dengan PWYP dan Somasi NTB selaku mitra OMS.</li> </ol>	
	<b>Proses Kokreasi:</b>  Rapat koordinasi asesmen penyelenggaraan SDI di 7 wilayah piloting project telah dilakukan bersama OMS.	<b>Aktif</b>
<b>Media Link</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 75%</b>
Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui	Pendampingan telah dilaksanakan oleh Media Link.	
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Semi Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

pilot project di Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.	<p>1. Media Link memiliki keterbatasan anggaran dalam melakukan pendampingan di Kabupaten Banggai.</p> <p>2. Dalam mendampingi Pemda (Riau dan Jawa Timur), Media link belum dilibatkan SDI sehingga Media Link berkoordinasi langsung dengan Pemda.</p>	
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi Riau, Jawa Timur, Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Brebes.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Pendampingan telah dilaksanakan dengan memetakan tantangan di masing-masing daerah <i>pilot project</i>.</p> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>1. Media Link telah melakukan pendampingan dengan catatan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tantangan di Provinsi Jawa Timur: forum data sulit dibentuk.</li> <li>b. Tantangan di Provinsi Riau: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data prioritas sektoral terkait SDA masih sulit dikumpulkan, portal data masih berisi ringkasan informasi.</li> <li>• Data keuangan belum ada panduan dari pusat.</li> <li>• Keterlibatan masyarakat sipil masih minim di tahap produksi data.</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Media Link mendorong terciptanya kebijakan satu data dengan memperhatikan pelibatan masyarakat dan kokreasi dalam setiap prosesnya serta menjadikan satu data sebagai acuan dalam melakukan pengawasan yang efektif.</p> <p>3. Untuk Kabupaten Banggai dan Kabupaten Brebes, pendampingan yang telah dilakukan Media Link adalah dalam pembuatan rencana aksi satu data.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p> <p><b>Aktif</b></p>
<b>Publish What You Pay (PWYP)</b>		

<b>Target B06:</b> Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.	<b>Capaian Target:</b> PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> PWYP sudah mendampingi provinsi NTB bersama dengan Sekretariat OGI.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Provinsi NTB.	<b>Capaian Target:</b> PWYP telah melaksanakan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PWYP telah melakukan pendampingan dengan catatan sebagai berikut: Strategi yang harus dilakukan untuk mempercepat penetapan Rencana Aksi Satu data NTB adalah dengan segera menetapkan Pergub Satu data NTB, dan setelahnya penyusunan rencana aksi dapat dilakukan secepatnya.</li> <li>2. PWYP telah bekerjasama dengan SDI dalam melakukan pendampingan pada Pemprov NTB melalui pelaksanaan asesmen untuk menilai kesiapannya dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI.</li> </ol>	<b>Aktif</b>
<b>Transparency International Indonesia (TII)</b>		
<b>Target B06:</b> Pendampingan dan penyusunan draft rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot	<b>Capaian Target:</b> TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> TII sudah mendampingi Kota Semarang bersama dengan Sekretariat OGI.	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

project di Kota Semarang.		
<b>Target B12:</b>  Pendampingan penetapan rencana aksi SDI di tingkat daerah melalui pilot project di Kota Semarang.	<b>Capaian Target:</b>  TII telah bekerjasama dengan SDI dalam melakukan pendampingan pada Pemkot Semarang melalui pelaksanaan asesmen untuk menilai kesiapannya dalam mengintegrasikan data daerah ke portal SDI.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  TII telah melakukan pendampingan di Kota Semarang dengan catatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berdasarkan temuan sementara, terlalu banyak aplikasi dalam pengelolaan data bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah pusat.</li> <li>• Persoalannya, aplikasi yang tersedia tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem satu data di Kota Semarang. Perkembangan baik dalam pengelolaan data dalam Dashboard Vaksin, Pemerintah Kota Semarang memberikan informasi yang sangat detail dalam Dashboard Vaksin.</li> </ul>	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut:</b>  <b>UK 1</b>  1. Sekretariat SDI perlu mengadakan rapat reguler dengan Pemda dan OMS untuk menyepakati rencana aksi daerah, sehingga rencana aksi dapat segera dilaksanakan.		

## Komitmen 4

### Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Ukuran Keberhasilan 1:		
Menguatnya kapasitas masyarakat dan pendamping desa untuk memahami konsep Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat yang difokuskan pada partisipasi, transparansi, akuntabilitas sosial, dan inovasi di dua desa pilot project.		
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT)		
<b>Target B06:</b>  Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	<b>Nilai: -</b>
<b>Target B12:</b>  Tidak ada target B12.		<b>Nilai: -</b>
Kementerian Dalam Negeri		
<b>Target B06:</b>  Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	<b>Nilai: -</b>
<b>Target B12:</b>  Tidak ada target B12.		<b>Nilai:-</b>
Yayasan Tifa		
<b>Target B06:</b>  Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	<b>Nilai:</b>  -

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B12:</b> Sosialisasi dan pelatihan Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pendamping desa.	<b>Capaian Target:</b> Desa yang ditetapkan sebagai <i>pilot project</i> adalah Desa Guwosari dan Desa Sriharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sosialisasi telah dilakukan dengan dua metode, yaitu secara daring dan luring.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Yayasan Tifa bersama Atmawidya Alterasi telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Desa PDTT terkait kegiatan sosialisasi yang akan dihadiri oleh Kepala dan Perangkat Desa; Warga Desa; Anggota BPD, serta Pendamping Lokal Desa.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Terlaksananya pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua desa.		
<b>Kementerian Desa PDTT</b>		
<b>Target B06:</b>  1. Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan	<b>Capaian Target:</b> Kementerian Desa PDTT telah melakukan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan <i>pilot project bersama Yayasan TIFA sebagai lead implementer</i> Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



n Berbasis Masyarakat. 2. Rekomendasi penetapan lokasi desa untuk pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	Kokreasi telah terjadi dengan adanya koordinasi antara Kementerian Desa PDTT dan Yayasan TIFA.	
<b>Target B12:</b> Tidak ada target B12.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	<b>Nilai: -</b> -
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>		
<b>Target B06:</b> Tidak ada target B06.	Sesuai dengan kesepakatan antar Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Yayasan Tifa. Maka Capaian Target di periode ini ditiadakan.	<b>Nilai: -</b> -
<b>Target B12:</b> Rapat Koordinasi terkait persiapan pelaksanaan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat.	<b>Capaian Target:</b> Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder dalam komitmen ini terkait persiapan <i>pilot project</i> Evaluasi Program Pembangunan.  <b>Proses Kokreasi:</b> Rapat koordinasi dilaksanakan bersama Kementerian Desa PDTT dan Yayasan TIFA sebagai stakeholder terkait dalam komitmen ini.	<b>Nilai: 100%</b>  <b>Aktif</b>
<b>Yayasan Tifa</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 50%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p>Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa.</p>	<p>Penetapan <i>pilot project</i> akan dilakukan pada B12.</p> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan Tifa bersama Kemendes PDTT telah melakukan koordinasi persiapan dan penetapan 2 desa pilot project.</li> <li>2. Namun mengacu pada surat yang dikirimkan oleh Yayasan TIFA kepada sekretariat OGI, capaian B06 terkait pemilihan desa akan dimundurkan ke B12.</li> </ol>	<p><b>Semi Aktif</b></p>
<p><b>Target B12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan pilot project Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat di beberapa desa.</li> <li>2. Terpilihnya desa yang merupakan hasil koordinasi dari K/L dan Yayasan TIFA.</li> </ol>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Yayasan TIFA telah melakukan persiapan untuk kegiatan ujicoba, sosialisasi, dan pelatihan terkait penyelenggaraan program review di Kabupaten Bantul.</p> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Desa yang terpilih sebagai <i>pilot project</i> yaitu Desa Guwosari dan Desa Sriharjo Kabupaten Bantul, berupa koordinasi, ujicoba, sosialisasi, dan pelatihan tahap I program review secara daring dan luring bersama Japan Initiative dan Atmawidya Alterasi Indonesia, dengan dihadiri Kepala dan Perangkat Desa; Warga Desa; Anggota BPD, serta Pendamping Lokal Desa.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p> <p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p> <p>Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT dapat terlibat dalam memberikan masukan substansi untuk kegiatan bimbingan teknis agar selaras dengan P3PD.</p>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 5

### Model Inovasi Pelayanan Publik untuk Kelompok Marjinal

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>		
Terlaksananya diseminasi "Pelayanan Publik bagi Kelompok Marjinal"		
<b>Lembaga Administrasi Negara</b>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Diseminasi pada tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi (4 daerah).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah melakukan diseminasi tahap <i>diagnose/design</i> kegiatan Laboratorium Inovasi di 4 daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kab. Kepulauan Tanimbar.</li> <li>b. Kab. Lombok Utara.</li> <li>c. Kab. Tojo Una-Una.</li> <li>d. Kab. Sorong.</li> </ol> </li> <li>2. Bahan diseminasi menggunakan bahan terkait inovasi layanan publik yang disiapkan oleh LAN dan diperkaya dengan bahan terkait layanan publik bagi kelompok Marjinal dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pengurus Besar Nahdatul Ulama (Lakpesdam PBNU).</li> </ol>	
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Aktif</b>
	LAN telah melakukan koordinasi dengan Lakpesdam PBNU mengenai bahan yang akan didiseminasikan pada kegiatan Laboratorium Inovasi di 4 daerah.	
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
Penyusunan Laporan hasil Diseminasi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LAN telah menyusun laporan pelaksanaan model inovasi pelayanan publik untuk kelompok marjinal yang menjelaskan progres pelaksanaan laboratorium di 4 lokus</li> <li>2. Kelompok sasaran inovasi terdiri atas perempuan dan anak korban kekerasan, masyarakat miskin, orang dengan disabilitas, masyarakat dengan yang kesulitan karena</li> </ol>	

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>kondisi geografis, serta masyarakat lansia, baik dari sektor sosial, Pendidikan, Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, penataan ruang, dan ketenagakerjaan.</p> <p>3. Terdapat 19 inovasi di 4 lokus kelompok marjinal, yaitu:</p> <p>a. Kabupaten Kepulauan Tanimbar Inovasi untuk kelompok marjinal (termasuk yang marjinal karena akses) yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terdapat 5 inovasi. Inovasi-inovasi tersebut dihasilkan oleh Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP2KBPMMD); dan Dinas Pendidikan.</p> <p>b. Kab. Lombok Utara Jumlah inovasi untuk kelompok marjinal yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sebanyak 7 inovasi. Dinas atau unit kerja pengusul inovasi untuk kelompok marjinal juga variatif, yaitu Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan; Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; DP2KBPMMD; Rumah Sakit Umum Daerah; dan Puskesmas.</p> <p>c. Kab. Tojo Una-Una Jumlah inovasi yang dihasilkan untuk kelompok marjinal sebanyak 5 inovasi. Inovasi-inovasi tersebut berasal dari Dinas Sosial; Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat; Puskesmas; Dinas Pemberdayaan</p>	
--	--	--

	<p>Perempuan dan Perlindungan Anak; dan DP2KBPMMD.</p> <p>d. Kab. Sorong Ada 2 inovasi untuk kelompok marginal yang berasal dari Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Proses pelaksanaan dan penyusunan laporan telah melibatkan Lakpesdam PBNU yang memberikan materi terkait kelompok marginal dalam penyusunan bahan paparan untuk laboratorium inovasi.</p>	<b>Aktif</b>
<b>Lakpesdam PBNU</b>		
<p><b>Target B06:</b></p> <p>Ekspos hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marginal untuk LAN.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Lakpesdam PBNU telah memaparkan hasil inovasi Layanan Inklusi bagi kelompok Marginal kepada LAN.</p>	<b>Nilai: 100%</b>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Paparan dari Lakpesdam PBNU digunakan oleh LAN untuk dipaparkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 4 daerah pendampingan.</p>	<b>Aktif</b>
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Pemetaan dan perumusan materi strategi pendampingan.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Dari 4 (empat) wilayah yang mendapat pendampingan dari Laboratorium Inovasi (Labinov) LAN tahun 2020-2022 yakni Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Tojo Uno-Uno. Terpetakan 8 (delapan) kluster inovasi layanan untuk kelompok marginal, yaitu:</p>	<b>Nilai: 100%</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kluster disabilitas yakni Care ODD (Peduli Orang Dengan Disabilitas) di Kepulauan Tanimbar;</li> <li>b. Kluster anak yakni KUBE APUS (Kelompok Usaha Bersama Anak Putus Sekolah) dan ADAUT (Ada Rumah Pintar) di Kepulauan Tanimbar, Bersinergi dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak dan Stunting di Lombok Utara, dan Satgas KIBBAR (Satuan Tugas Kesehatan Ibu, Balita, Anak, dan Remaja) di Tojo Una-Una;</li> <li>c. Kluster perempuan yang merangkum perempuan korban kekerasan dan perempuan miskin serta perempuan sebagai kelompok marginal dalam aspek sosial politik kemasyarakatan seperti Peta Daya Perempuan Tanimbar Berdaya di Kepulauan Tanimbar, Budame Miskin (budidaya udang Vaname sistem kolam bundar bagi perempuan miskin pesisir Kabupaten Lombok Utara) serta Berugak Perempuan di Lombok Utara;</li> <li>d. Kluster masyarakat adat seperti Kokore Kodara (Kokore Ko Sodara) di Sorong;</li> <li>e. Kluster PMKS seperti Satgas PMKS (Satuan Petugas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Lombok Utara;</li> <li>f. Kluster masyarakat pulau terpencil seperti Nyatfar Kreatif di Lombok Utara dan Dokter Masuk Pulau di Tojo Una-Una;</li> <li>g. Kluster lansia seperti KelasTeras (Kelompok Lansia Terintegrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional) di Lombok Utara dan Gerakan Cinta Lansia di Tojo Una-Una; dan</li> <li>h. Kluster masyarakat miskin seperti Si Abang Tersipu (Sistem Informasi Bangunan Terintegrasi Sistem Informasi Penduduk Miskin) di Tojo Una-Una.</li> </ul>	
--	---	--

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Beragam strategi bisa ditempuh dalam pendampingan kelompok marginal sehingga inovasi yang dilakukan dapat terwujud dan tepat sasaran. Strategi yang dimaksud antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemetaan aktor-aktor yang bisa mendukung inovasi oleh OPD terkait.</li> <li>b. sinergi sesama dinas terkait untuk mengatasi keterbatasan nomenklatur dan keterbatasan birokrasi lainnya.</li> <li>c. kolaborasi dengan komunitas atau organisasi setempat untuk mencapai tujuan mutlak dilakukan agar inovasi layanan dapat mencapai tujuan.</li> </ul>	<b>Aktif</b>
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p> <p>Diperlukan penjagaan komitmen LAN maupun Lakpesdam PBNU dalam mengembangkan inovasi yang sudah ditemukan serta dalam menjalankan strategi pendampingan di 4 lokus laboratorium inovasi. Perlu adanya penyusunan timeline kegiatan Labinov agar Lakpesdam dapat terus terlibat dalam setiap tahap kegiatan, karena pada tahun 2021 Lakpesdam hanya fokus terlibat dalam penyiapan bahan saja.</p>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 6

### Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, Ditjen PAS Kemenkumham, dan Polri.		
<b>Mahkamah Agung</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Surat Keputusan Dirjen Badilag dan Keputusan Dirjen Badilum tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas. 2. Pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	<b>Capaian Target:</b> MA telah menyusun Peraturan Teknis dalam Keputusan Dirjen Badilag (Badan Peradilan Agama) dan Keputusan Dirjen Badilum (Badan Peradilan Umum) tentang Standar Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Dalam proses pemenuhan B06, MA telah melibatkan unsur non-pemerintah, yakni Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) untuk memberikan masukan dalam Pemenuhan Akomodasi yang Layak. Dirjen Badilag bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyusun SK Ditjen Badilag.	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B12:</b> Draft SK Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimiltun) terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	<b>Capaian Target:</b> Telah disusunnya Draft SK Ditjen Badimiltun terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Badimiltun telah melakukan MoU dengan Sabda untuk mengirimkan pelatihan pada Aparat Penegak Hukum, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana bagi disabilitas.	<b>Aktif</b>
<b>Kejaksaan Agung</b>		
<b>Target B06:</b> Penyusunan draft pemetaan kebutuhan pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	<b>Capaian Target:</b> Kejari telah mengumpulkan draft pemetaan yang berisikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Hambatan penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.</li> <li>b. Cara mewujudkan pengadilan yang inklusif.</li> </ul>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> 1. Indonesia Judicial Research Society (IJRS) sudah dilibatkan dalam mediasi terkait pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	2. IJRS sudah masuk dalam Pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021.	
<b>Target B12:</b>  Kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.	<b>Capaian Target:</b>  1. Kejaksaan RI telah menghasilkan kajian terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.  2. Kajian yang dihasilkan berisi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. asesmen kebutuhan akomodasi, hambatan yang sering dialami oleh penyandang disabilitas saat proses prapenuntutan hingga penuntutan; dan</li> <li>b. mekanisme yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui peradilan inklusif guna terwujudnya pengakuan penyandang disabilitas sebagai pihak yang setara saat berhadapan dengan hukum di dalam proses penuntutan.</li> </ul>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  1. IJRS sudah dilibatkan dalam mediasi terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.  2. IJRS sudah masuk dalam pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021.	<b>Aktif</b>

Ditjen PAS Kemenkumham		
<b>Target B06:</b> Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	<b>Capaian Target:</b> Telah tersedia SOP dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Dalam proses pemenuhan B06 telah melibatkan unsur non-pemerintah, yaitu Asia Foundation dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) UII dalam proses pembuatan kebijakan pemenuhan sarana dan prasarana akomodasi yang layak.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Tersedianya peraturan teknis terkait dengan SOP dalam rangka pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Lembaga pemasyarakatan.	<b>Capaian Target:</b> Telah dibentuknya <i>piloting</i> Unit Layanan Disabilitas (ULD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, dengan kegiatan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat persiapan tentang Bimbingan Teknis.</li> <li>b. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas bagi Petugas Pemasyarakatan diikuti oleh perwakilan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Direktorat Keamanan dan Ketertiban, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi, Direktorat Pusat Studi Hak Asasi Manusia</li> </ul>	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



	Universitas Islam Indonesia, dan The Asia Foundation.	
	<b>Proses Kokreasi:</b> Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis dengan PUSHAM UII dan The Asia Foundation.	<b>Aktif</b>
<b>Kepolisian Republik Indonesia</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Penyusunan SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang	<b>Capaian Target:</b> 1. Telah tersusun SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak. 2. Telah tersusun buku panduan bagi penyidik terkait kebutuhan akomodasi	<b>Nilai: 0%</b>

layak bagi penyandang disabilitas.	bagi	yang layak bagi penyandang disabilitas.	
2. Penyusunan panduan penyidik kebutuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.	buku bagi terkait yang bagi	Namun, Kepolisian RI tidak mengumpulkan data dukung.	
		<b>Proses Kokreasi:</b> Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b>		<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 100%</b>
1. Tersedianya SOP terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.	yang bagi	1. Telah tersedia SOP pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas. 2. Telah tersedia Buku Panduan terkait pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.	
2. Tersedianya panduan penyidik kebutuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas.	buku bagi terkait yang bagi	<b>Proses Kokreasi:</b> Dalam penyusunan SOP Kepolisian RI telah melakukan kokreasi bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI).	<b>Aktif</b>
<b>OMS Sektor Keadilan</b>			
<b>Target B06:</b>		<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai:100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p>1. Keterlibatan dalam proses pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kementerian/Lembaga (K/L).</p> <p>2. Tersedianya masukan terhadap pemetaan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L.</p>	<p>1. IJRS telah terlibat dalam proses pemetaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI.</p> <p>2. Masukan IJRS terhadap pemetaan ialah sebagai berikut: hambatan paling banyak adalah dari luar individu penyandang disabilitas, yaitu dari lingkungannya, infrastruktur, paradigma masyarakat hingga budaya hukum yang belum mengakomodir kebutuhan.</p>	
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L.</p>	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>IJRS menjadi bagian dari tim pemetaan yang dibuktikan melalui SK Kejaksaan Agung No. 166 Tahun 2021.</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Keterlibatan dalam rapat penyusunan peraturan teknis terkait kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di K/L.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>IJRS sudah dilibatkan dalam mediasi terkait asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di Kejaksaan.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>1. IJRS sudah masuk dalam Pokja akses keadilan di Kejaksaan sejak 9 Juli 2021.</p> <p>2. IJRS belum mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga lainnya: Polri, MA, Lapas.</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p> <p>1. Mahkamah Agung perlu segera memenuhi Peraturan Mahkamah Agung terkait pemenuhan penyandang disabilitas.</p> <p>2. Diperlukan penguatan komitmen Polri dalam melaksanakan target-targetnya.</p>		

3. Proses koreksi antara Kementerian/Lembaga di komitmen ini perlu dikritik lagi, terutama bagi Polri, Ditjen PAS Kemenkumham, dan Mahkamah Agung.

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 7

### Penguatan Portal Informasi terkait Bantuan Hukum

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi		
<b>Mahkamah Agung</b>		
<b>Target B06:</b> Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara Kementerian/Lemba ga (K/L).	<b>Capaian Target:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahkamah Agung (MA) RI telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) disamping beberapa sistem aplikasi berbasis web lainnya.</li> <li>2. MA dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016.</li> <li>3. Sebagai bentuk tindak lanjut MoU tersebut, BPHN telah mengadakan rapat diskusi penjajakan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021.</li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS belum dilibatkan dalam proses kokreasi	<b>Pasif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B12:</b> Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	<b>Capaian Target:</b> 1. Telah ada rapat koordinasi Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badimiltun) MA dengan BPHN yang mendiskusikan rancangan pengembangan portal informasi, dengan fokus mengenai langkah persiapan point-point informasi yang dapat menjadi konsumsi publik berkaitan dengan Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengintegrasian. 2. Perlu ada koordinasi di dalam internal antara MA untuk menyepakati pengembangan portal ini.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS belum dilibatkan.	<b>Pasif</b>
<b>BPHN Kemenkumham</b>		
<b>Target B06:</b> Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.	<b>Capaian Target:</b> 1. BPHN telah memiliki suatu sistem aplikasi berbasis web dengan nama Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBankum) yang dikelola oleh BPHN dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM serta Pemberi Bantuan Hukum sebagai <i>user</i> . 2. MA dan BPHN Kemenkumham telah memiliki MoU terkait portal informasi bersama di tahun 2016.	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



	<p>3. Sebagai bentuk tindak lanjut MoU tersebut, BPHN telah mengadakan rapat diskusi penjajakan revitalisasi kerja sama dengan MA di awal tahun 2021.</p> <p>4. Target komitmen untuk perluasan akses dan kapasitas layanan bantuan hukum tercapai melalui adanya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru serta reakreditasi terhadap OBH yang sudah ada. Proses akreditasi dan verifikasi OBH baru penting untuk memperluas jangkauan bantuan hukum yang dapat diperoleh masyarakat. Selain itu, penting memastikan terjaganya kualitas pelayanan atas bantuan hukum yang diberikan oleh OBH kepada masyarakat agar berfungsi sebagaimana mestinya melalui proses reakreditasi OBH yang sudah ada. Namun, perlu adanya data yang menunjukkan jumlah OBH yang terdapat di suatu daerah, baik OBH yang dinyatakan lulus akreditasi dan verifikasi sebagai OBH baru maupun reakreditasi OBH yang sudah ada untuk mengetahui kemudahan masyarakat memperoleh akses layanan bantuan hukum di setiap daerah.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan BPHN telah melakukan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan portal informasi hukum.</p>	<p><b>Aktif</b></p>

<b>Target B12:</b> Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	<b>Capaian Target:</b> 1. Telah ada rapat koordinasi antara BPHN dengan Badimiltun MA yang mendiskusikan rancangan pengembangan portal informasi, dengan fokus mengenai langkah persiapan point-point informasi yang dapat menjadi konsumsi publik berkaitan dengan Bantuan Hukum serta langkah-langkah pengintegrasian. 2. Rapat dilakukan atas undangan dari BPHN.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> BPHN menggunakan hasil Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) di wilayah provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan sebagai dasar untuk mengembangkan portal informasi bantuan hukum sebagai layanan satu pintu.	<b>Aktif</b>
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.		
<b>Target B06:</b> 1. Pemetaan kebutuhan data-data yang akan	<b>Capaian Target:</b> OMS belum menyusun pemetaan dan kajian terkait portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi.	<b>Nilai: 0%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p>dibuka baik dalam portal informasi BPHN maupun lintas kementerian.</p> <p>2. Tersedianya kajian dan masukan terkait data kebutuhan dalam portal informasi bantuan hukum yang terintegrasi dan terbuka.</p>	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Koordinasi baru terjadi antara PBHI dengan BPHN, sedangkan dengan MA tidak terjadi.</p>	<p><b>Pasif</b></p>
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Tersedianya kajian dan data kebutuhan terkait portal informasi bantuan hukum yang terbuka.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>IJRS telah melakukan Survey Kebutuhan Hukum di Indonesia pada Tahun 2019 yang dilakukan di wilayah provinsi Lampung dan Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 89,5% responden di Provinsi Lampung dan 92,3% responden di Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengetahui adanya Organisasi Bantuan Hukum.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Berdasarkan hasil survei, rekomendasi yang diberikan ialah, perlu adanya portal informasi bantuan hukum sebagai layanan satu pintu yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Portal ini nantinya bertujuan untuk memberikan layanan pencarian informasi ataupun layanan konsultasi terkait bantuan hukum.</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

1. Mahkamah Agung harus segera berkoordinasi internal dengan Biro Perencanaan untuk mendapatkan persetujuan rencana pengembangan portal.
2. Mahkamah Agung harus mulai berinisiatif melakukan proses koreksi dengan OMS Sektor Keadilan sebagaimana yang telah dilakukan oleh BPHN Kemenkumham.

## Komitmen 8

### Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum

#### Ukuran Keberhasilan 1:

Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum.

#### BPHN Kementerian Hukum dan HAM

<b>Target B06:</b>  Penjaringan OBH baru yang akan diverifikasi dan diakreditasi (dalam bentuk sosialisasi dan pendataan).	<b>Capaian Target:</b>  BPHN telah melakukan identifikasi terkait calon organisasi bantuan hukum di setiap Kantor Wilayah Kemkumham di 33 Provinsi.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Koreksi:</b>  OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi penjaringan OBH baik dengan mengadakan zoom meeting maupun mengirim pesan Whatsapp.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b>  1. Terlaksananya proses verifikasi dan akreditasi OBH baru. 2. Terlaksananya proses reakreditasi	<b>Capaian Target:</b>  1. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum baru untuk periode tahun 2022 – 2024 terhadap 121 organisasi di tahun 2021.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

OBH yang sudah ada.	<p>2. Proses verifikasi dan akreditasi terdiri dari tahap pendaftaran, perbaikan ketidaklengkapan dokumen verifikasi, pemeriksaan faktual/survei lapangan, rekomendasi pokjada, verasi pusat, sampai rekomendasi kelolosan PBH baru, yang dilakukan oleh Tim 7 bersama Kelompok Kerja Pusat (Pokjapus).</p> <p>3. Re-akreditasi juga telah dilakukan terhadap 498 OBH lama dari periode sebelumnya 2019-2021.</p> <p>4. Total OBH baru yang sudah verifikasi dan akreditasi serta OBH lama yang reakreditasi periode 2022-2024 ini adalah 619 OBH.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>BPHN sudah melibatkan YLBHI dalam Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi (Tim 7).</p>	Aktif
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<p><b>Target B06:</b></p> <p>Sosialisasi kegiatan outreach/penjaringan OBH di daerah.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>OMS telah berpartisipasi dalam sosialisasi dengan BPHN.</p>	Nilai: 100%
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>OMS telah membantu BPHN dalam melakukan sosialisasi dan membagikan pesan <i>whatsapp</i> serta mengadakan zoom <i>meeting</i>.</p>	Aktif
<p><b>Target B12:</b></p>	<p><b>Capaian Target</b></p> <p>YLBHI telah terlibat dalam proses verifikasi.</p>	Nilai: 100%

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlibatan dalam proses verifikasi dan akreditasi OBH baru.</li> <li>2. Keterlibatan dalam proses reakreditasi OBH yang sudah ada.</li> </ol>	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>BPHN sudah melibatkan YLBHI dalam anggota Tim Panitia Verifikasi dan Akreditasi (Tim 7).</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Ukuran Keberhasilan 2:</b></p> <p>Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.</p>		
<p><b>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</b></p>		
<p><b>Target B06:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal.</li> <li>2. Tersedianya pedoman kurikulum pelatihan paralegal.</li> </ol>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah tersedia Permenkum HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum yang mengatur tentang ketentuan paralegal, hak dan kewajiban, kompetensi dan pelatihan, pemberdayaan paralegal, hingga pengawasan dan evaluasi paralegal.</li> <li>2. Telah tersedia Pedoman Kurikulum Pelatihan Paralegal.</li> </ol> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal dengan menjadi narasumber dalam Rapat Jaringan Bantuan Hukum.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p> <p><b>Aktif</b></p>



<b>Target B12:</b> Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal yang melibatkan OMS	<b>Capaian Target:</b> 1. BPHN telah mengadakan Diskusi Publik dengan tema “Mendorong Implementasi Kebijakan Pelatihan Paralegal Yang Mengakomodasi Stakeholders Bantuan Hukum”. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 September 2021 via platform zoom, mengundang narasumber yang berkompeten dari akademisi maupun praktisi. 2. Tanggapan peserta terhadap Permekumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal diperlukan untuk menilai efektivitas sosialisasi dan kesesuaian implementasi Permekumham 3/2021 dan Pedoman Diklat Paralegal.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> BPHN telah melibatkan PBHI dalam pelaksanaan diskusi publik dalam hal pelaksanaan teknis Diskusi Publik.	<b>Akif</b>
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<b>Target B06:</b> Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait paralegal.	<b>Capaian Target:</b> PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Aktif</b>

	PBHI telah terlibat dalam penyusunan peraturan terkait paralegal, tapi belum terlibat dalam penyusunan draf pedoman kurikulum pelatihan paralegal.	
<b>Target B12:</b>  Sosialisasi Peraturan Menteri Kemenkumham terkait Paralegal.	<b>Capaian Target:</b>  Sosialisasi telah dilakukan melalui pemaparan materi dalam kegiatan Rapat Jaringan Bantuan Hukum.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  BPHN telah melibatkan PBHI dalam pelaksanaan diskusi publik dalam hal pelaksanaan teknis.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b>  Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum.		
<b>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</b>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B06:</b>  1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Tersedianya Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Capaian Target:</b>  1. Permenkum HAM No 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum sudah disusun, yang meliputi: a. Standar Layanan Bantuan Hukum Litigasi. b. Standar Layanan Bantuan Hukum Nonlitigasi. 2. Kemenkumham juga telah menyusun pedoman terkait standar layanan bantuan hukum yang berisikan: a. Hak dan Kewajiban pemberi Bankum; b. Standar Layanan Bankum Litigasi; c. Standar layanan Bankum Non-Litigasi; dan d. Pembinaan: 1). Asistensi; 2) Penilaian; 3) Pengaduan; dan 5) Sanksi.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b>  1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum. 2. Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Capaian Target:</b>  1. BPHN telah melakukan beberapa kali sosialisasi kepada PBH via platform Zoom. 2. Sosialisasi juga telah dilakukan terhadap beberapa OBH via zoom, yakni Yayasan Hukum Lasinrang, LBH Surya NTT, dan BKBH FH Universitas Jember. 3. Sosialisasi diberikan agar setiap OBH dapat memperoleh pemahaman yang sama dalam memberikan layanan bantuan hukum, sehingga dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan layak.	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<b>Proses Kokreasi:</b> BPHN telah melakukan sosialisasi bersama dengan OMS , yaitu Yayasan Hukum Lasinrang, LBH Surya NTT, dan BKBH FH Universitas Jember.	<b>Aktif</b>
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<b>Target B06:</b> Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan terkait Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Capaian Target:</b> OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS sudah terlibat dalam penyusunan peraturan Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Sosialisasi Standar Layanan Bantuan Hukum.	<b>Capaian Target:</b> OMS tidak mengumpulkan data dukung	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS tidak mengumpulkan data dukung	<b>Pasif</b>
<b>Tindak Lanjut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengingat jumlah OBH yang banyak serta memastikan pemahaman yang baik, maka perlu ditentukan sosialisasi rutin terhadap beberapa OBH dalam periode tertentu serta kejelasan waktu kapan sosialisasi dilakukan.</li> <li>2. Diperlukan penguatan komitmen dan pengkonkritan proses kokreasi BPHN Kemenkumham dan OMS Sektor Keadilan/PBHI.</li> </ol>		

## Komitmen 9

### Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Korban

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>  Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.		
<b>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</b>		
<b>Target B06:</b>  Identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan berdasarkan hasil :  1. Analisa dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN. 2. Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan.	<b>Capaian Target:</b>  Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah melakukan identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan dengan hasil:  a. adanya kesempatan bagi kelompok rentan memperjuangkan haknya dalam judicial review. b. ketimpangan jumlah PBH. c. bankum yang dinilai belum memberikan keadilan. d. pelaksanaan bankum yang masih menitikberatkan pada litigasi dan lokasi biaya.  Analisa tersebut menjadi dasar pentingnya melakukan revisi UU Bankum.	<b>Nilai:</b>  <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  BPHN Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan kokreasi dengan LBH Apik dalam	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	bentuk <i>Focus Group Discussion</i> dalam penyusunan.	
<b>Target B12:</b>  Evaluasi kebijakan bantuan hukum terkait pemberian bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	<b>Capaian Target:</b>  1. Kementerian Hukum dan HAM telah menyelesaikan hasil evaluasi terhadap UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dengan temuan akar permasalahan, yakni definisi dari penerima bantuan hukum itu sendiri yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 5 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang hanya memberikan cakupan terhadap masyarakat kurang mampu atau miskin secara ekonomi. Padahal, masyarakat yang mampu secara ekonomi pun masih bisa mengalami kerentanan pada aspek lain, misalnya gender. Hal tersebut mengakibatkan perspektif gender dan keberpihakan terhadap kelompok rentan yang tidak hanya sekadar rentan ekonomi menjadi penting untuk menjadi fokus perhatian demi mewujudkan keadilan secara lebih merata.  2. Dalam laporannya, Kementerian Hukum dan HAM telah berhasil merumuskan kualifikasi atas 3 hal, yaitu (1) Setiap orang yang berada dalam Proses Perkara; (2) Masyarakat mampu; dan (3) Masyarakat kurang mampu.	<b>Nilai:</b>  <b>100%</b>



	<b>Proses Kokreasi</b> LBH APIK telah dilibatkan dalam melakukan evaluasi UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, melalui kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan. Pelibatan LBH APIK tergambarkan dalam laporan data dukung dari BPHN Kementerian Hukum dan HAM	Aktif
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<b>Target B06:</b> Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	<b>Capaian Target:</b> Telah tersedia kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> LBH Apik telah mempresentasikan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan kepada aparat penegak hukum wilayah DKI Jakarta, Pengadilan tinggi, Polda polres, Kejati/kejar, Kanwil Kemenkumham DKI dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI, tetapi belum dipresentasikan ke BPHN.	Aktif

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B12:</b> Tersedianya kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	<b>Capaian Target:</b> LBH APIK berpartisipasi dalam penyusunan kajian dan data terkait kebijakan bantuan hukum untuk korban, terutama kelompok rentan dan perempuan	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Proses kokreasi terlihat dalam Data Dukung BPHN, yaitu melalui pelibatan dalam perumusan terkait kebijakan bagi kelompok rentan dan perempuan.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan, dan gender.		
<b>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</b>		
<b>Target B06:</b> Penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan, dan	<b>Capaian Target:</b> Telah tersusun kurikulum oleh BPHN dengan memasukan perspektif korban dan sensitifitasnya dalam materi isu-isu kelompok rentan dan gender. Adapun perspektif gender yang dimasukkan dalam kurikulum ini ialah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definisi Gender, minoritas, dan kelompok rentan;</li> <li>2. Konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan; dan</li> <li>3. Isu-isu terkait gender, minoritas, dan kelompok rentan.</li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>

gender yang melibatkan OMS.	<b>Proses Kokreasi:</b> Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021, melalui pelibatan dalam perumusan dan pemberian masukan.	Aktif
<b>Target B12:</b> Sosialisasi kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.	<b>Capaian Target:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi kurikulum kepelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan dengan 3 OMS, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA).</li> <li>b. Asosiasi LBH Apik.</li> <li>c. LBH Papua Justice and Peace.</li> </ol> </li> <li>2. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan tiga hal utama, yaitu:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat menjelaskan definisi gender, minoritas dan kelompok rentan.</li> <li>b. Dapat menjelaskan konsep gender, minoritas, dan kelompok rentan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.</li> <li>c. Dapat menggali issue-issue terkait gender, minoritas dan kelompok rentan.</li> </ol> </li> </ol>	Nilai: 100%

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<b>Proses Kokreasi:</b> Terlibat dalam melakukan sosialisasi kepada Aparat Penegak hukum.	Aktif
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<b>Target B06:</b> Terlibatnya OMS dalam penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	<b>Capaian Target:</b> OMS telah terlibat dalam penyusunan kurikulum dalam bentuk partisipasi perumusan dan pemberian masukan.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Proses kokreasi antara BPHN dan OMS Sektor Keadilan telah terjadi dalam penyusunan kurikulum pelatihan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum bersama sejak 2019 hingga 2021, melalui pelibatan dalam perumusan dan pemberian masukan.	Aktif
<b>Target B12:</b> Penyusunan modul peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	<b>Capaian Target:</b> Proses Kokreasi antara BPHN dengan LBH APIK teridentifikasi dalam Data Dukung BPHN. Bentuk kokreasi yang dilakukan ialah sosialisasi bersama dengan BPHN.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Proses Kokreasi antara BPHN dengan LBH APIK teridentifikasi dalam Data Dukung BPHN. Bentuk kokreasi yang dilakukan ialah sosialisasi bersama dengan BPHN.	Aktif

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

**Tindak Lanjut:**

1. Pada UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu ditambahkan cakupan perkara perdata, tata usaha negara, maupun *judicial review*.
2. Mengingat jumlah PBH yang banyak serta memastikan pemahaman yang baik, maka perlu ditentukan sosialisasi rutin terhadap beberapa PBH dengan kurikulum yang mencakup pengimplementasian konsep tersebut ke konteks pemberian bantuan hukum.
3. Diperlukan penguatan komitmen dan pengkonkritan proses koreksi BPHN Kemenkumham dan OMS Sektor Keadilan/LBH APIK.

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 10

### Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
<b>BPHN Kementerian Hukum dan HAM</b>		
<b>Target B06:</b> Terinventarisir dan teridentifikasinya materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Capaian Target:</b> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan analisa dan kajian singkat yang hasilnya menunjukkan bahwa kasus sengketa informasi dapat dipertimbangkan untuk masuk dalam salah satu jenis perkara baik litigasi dan/atau nonlitigasi, dengan catatan kasus tersebut masuk dalam ruang lingkup layanan bantuan hukum, di antaranya : (1) Litigasi (Perdata dan TUN); (2) Nonlitigasi (Penyuluhan Hukum, Pemberdayaan Masyarakat, Konsultasi Hukum, Mediasi, Negosiasi, Investigasi Kasus, Pendampingan di Luar Pengadilan, Drafting Dokumen, dan Penelitian Hukum).	<b>Nilai: N/A</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	<b>Pasif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



<b>Target B12:</b>  Proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Capaian Target:</b>  1. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui BPHN telah melakukan analisa dan kajian singkat mengenai penanganan sengketa informasi. Adapun perjenis sengketa informasi belum terakomodir dalam pilihan jenis perkara pada Aplikasi Sistem Informasi Bantuan Hukum (Sidbankum) yang merupakan aplikasi permohonan bantuan hukum, dapat disesuaikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dari hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.  2. BPHN tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait.	<b>Nilai 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, BPHN belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	<b>Pasif</b>
<b>Komisi Informasi Pusat</b>		
<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b>  Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B06:</b> Tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).	<b>Capaian Target:</b> KIP telah menyusun data sengketa informasi yang sudah dimasukkan dalam Laporan Kinerja Komisi Informasi Pusat tahun 2019 halaman 16 – 21, dengan jumlah permohonan sengketa sebanyak 2928 kasus sepanjang 2010-2019. Sedangkan penyelesaian sengketa informasi publik sebanyak 2531 kasus sepanjang 2010-2019.	<b>Nilai: 100%</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Keterlibatan dalam kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.		
<b>Target B06:</b> Terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Capaian Target:</b> Komisi Informasi Pusat tidak terlibat dalam penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya hasil kajian dari OMS terkait.	<b>Nilai:</b> <b>N/A</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, KIP belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.	
<b>Target B12:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai:</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<p>1. Keterlibatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi telah dilakukan dengan menyediakan data sengketa informasi sebagaimana telah dilaporkan pada target B06 mengenai tersedianya data sengketa informasi yang terpilah (data penyelesaian sengketa informasi yang selesai tahap Mediasi, adjudikasi non litigasi, serta Tahap Keberatan atas putusan KI di PTUN dan PN).</p> <p>2. KIP tidak dapat melanjutkan penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan tidak adanya data hasil kajian dari OMS terkait.</p>	N/A
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>OMS belum melakukan pemetaan kebutuhan, KIP belum dapat menindaklanjuti Capaian Target ini.</p>	
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<p><b>Ukuran Keberhasilan 1:</b></p> <p>Terlaksananya fasilitasi kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>		
<b>Target B06:</b>	<b>Capaian Target:</b>	<b>Nilai: 0%</b>

Terlibat dalam proses inventarisir dan Identifikasi materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	OMS belum terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi kajian.	
	<b>Proses Kokreasi:</b>  OMS tidak terlibat dalam proses inventarisir dan identifikasi materi kajian.	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> Terlibat dalam proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Capaian Target:</b> OMS tidak membuat kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Tidak terjadi proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi dikarenakan OMS terkait tidak melaksanakan kajian.	<b>Pasif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Terlaksananya pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN.		
<b>Target B06:</b> Pemetaan kebutuhan terkait pelatihan	<b>Capaian Target:</b> OMS belum membuat pemetaan kebutuhan penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Nilai: 0%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS tidak melaksanakan pemetaan kebutuhan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> Perancangan pelatihan terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi kepada OBH dengan melibatkan KIP dan BPHN.	<b>Capaian Target:</b> OMS tidak melaporkan data dukung terkait rancangan pelatihan bantuan hukum.	<b>Nilai 0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS tidak melakukan perancangan pelatihan terkait pelatihan bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.	<b>Pasif</b>
<b>Tindak Lanjut:</b> Diperlukan penguatan komitmen dan pengkonkritan proses kokreasi BPHN Kemenkumham, KIP, dan OMS Sektor Keadilan/YLBHI.		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 11

### Integrasi Data Kesejahteraan untuk Akuntabilitas Program-program Kesejahteraan

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya data terpadu kesejahteraan sosial yang terintegrasi dengan pengembangan SIKS – NG.		
<b>Kementerian Sosial</b>		
<b>Target B06:</b> Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial.	<b>Capaian Target:</b> Pengembangan integrasi DTKS dilakukan dengan pemutakhiran DTKS, yakni melalui pembaruan data agar menghindari data yang terulang, usang, dan tidak tepat sasaran. Pemutakhiran DTKS dapat terlihat pada Keputusan Mensos yang dikeluarkan setiap bulan.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Proses kokreasi telah terjadi dengan OMS terkait yakni Medialink dalam hal pemberian masukan terhadap integrasi DTKS.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Pengembangan integrasi data terpadu kesejahteraan sosial.	<b>Capaian Target:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK DTKS per bulan sejak April 2021 bisa didownload oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota.</li> <li>2. SK DTKS berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Data lengkap <i>by name by address</i> yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagai data tunggal dan padan data kependudukan yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial yang</li> </ol> </li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



	<p>berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota, bank penyalur bantuan sosial atau pos penyalur bantuan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.</p> <p>b. Sebagian data yang telah digunakan dalam penyaluran bantuan sosial di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Komunitas Adat Terpencil termasuk Suku Anak Dalam.</p> <p>c. Data yang sedang dalam proses perbaikan untuk data non-penyaluran bantuan sosial.</p> <p>3. SK DTKS per November 2021 berjumlah 140.688.408 jiwa, naik 1,01% dari jumlah 139.235.327 jiwa di April 2021.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Proses kokreasi telah terjadi antara Kementerian Sosial dengan Media Link, tetapi hanya berbentuk koordinasi. Sementara proses kokreasi yang substansial belum terjadi.</p>	<b>Aktif</b>
<b>Media Link</b>		
<p><b>Target B06:</b></p> <p>Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS – NG.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Media Link telah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG.</p>	<b>Nilai: 100%</b>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra, dengan rekomendasi:</p>	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>a. Melihat perkembangan saat ini, maka proses pemadanan yang belum dilakukan sampai 100% harus segera dituntaskan. Integrasi dengan seluruh program akan menjadi kemajuan penting pada perwujudan akuntabilitas seluruh program-program kesejahteraan sosial pemerintah.</p> <p>b. Kemensos perlu mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi yang inklusif bagi PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial) dengan cara mengembangkan mekanisme khusus (terpisah dari mekanisme regular) untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan termarginalkan dengan mengoptimalkan peran CSO melalui swakelola Tipe 3 maupun mengoptimalkan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme verifikasi dan validasi online.</p>	
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Tersedianya kajian dan masukan terkait pengembangan SIKS – NG.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Media Link telah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Media Link sudah membuat kajian terkait pengembangan dan perbaikan SIKS – NG sebagai OMS mitra, dengan rekomendasi:</p> <p>a. Melihat perkembangan saat ini, maka proses pemadanan yang belum dilakukan sampai 100% harus segera dituntaskan. Integrasi dengan seluruh</p>	<p><b>Aktif</b></p>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>program akan menjadi kemajuan penting pada perwujudan akuntabilitas seluruh program-program kesejahteraan sosial pemerintah.</p> <p>b. Kemensos perlu mengembangkan mekanisme verifikasi dan validasi yang inklusif bagi PPKS (Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial) dengan cara mengembangkan mekanisme khusus (terpisah dari mekanisme regular) untuk merespon kebutuhan kelompok rentan dan termarginalkan dengan mengoptimalkan peran CSO melalui swakelola Tipe 3 maupun mengoptimalkan aplikasi Cek Bansos untuk mekanisme verifikasi dan validasi online.</p>	
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> <p>Tersedianya informasi tentang data penerima program kesejahteraan melalui platform yang mudah diakses oleh publik dan responsif terhadap feedback masyarakat.</p>		
<b>Kementerian Sosial</b>		
<b>Target B06:</b> <p>Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.</p>	<b>Capaian Target:</b> <p>Kemensos telah mengembangkan data penerima program kesejahteraan sosial untuk diakses oleh Penerima Manfaat melalui laman: <a href="https://cekbansos.kemensos.go.id">https://cekbansos.kemensos.go.id</a>. Nantinya Penerima Manfaat dapat mengecek apakah mereka menerima bantuan sosial seperti PKH, BST, dan BNPT.</p>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Pasif</b>

	Kemensos belum melibatkan unsur non-pemerintah dalam proses ini.	
<b>Target B12:</b>  Pengembangan data penerima program kesejahteraan sosial melalui platform yang mudah diakses oleh publik.	<b>Capaian Target:</b>  1. Untuk meningkatkan inklusifitas dan akuntabilitas dari masyarakat serta meningkatkan keterbukaan atau transparansi penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran, Kementerian Sosial mengembangkan fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos dalam bentuk mobile.  2. Aplikasi ini bisa di download di playstore dengan nama Aplikasi Cek Bansos. Usul Sanggah merupakan salah satu menu yang tersedia pada aplikasi cek bansos yang bisa diakses dengan menggunakan user id yang telah diverifikasi dan diaktivasi oleh admin Kementerian Sosial.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  Belum terjadi Proses Kokreasi antara Kementerian Sosial dengan OMS.	<b>Pasif</b>
<b>Media Link</b>		
<b>Target B06:</b>  Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data	<b>Capaian Target:</b>  Media Link belum melakukan sosialisasi.	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  Media Link belum melakukan sosialisasi.	<b>Pasif</b>

penerima program kesejahteraan.		
<b>Target B12:</b> Sosialisasi untuk menggerakkan masyarakat dalam menggunakan informasi yang ada dalam platform data penerima program kesejahteraan.	<b>Capaian Target:</b> Media Link telah melaksanakan sosialisasi dengan materi “Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi melalui Bresbes Data Tunggal.”	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Sosialisasi dilakukan pada 17 Kepala Desa dari 17 Kecamatan dan 5 Kelurahan di Kabupaten Brebes dengan materi : ‘Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi melalui Brebes Data Tunggal’ Pada sosialisasi ini, Media Link mengajak Kepala Desa agar masyarakat melakukan pemeriksaan data Bantuan Sosial masing-masing.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelibatan warga harus dilakukan sejak awal proses verifikasi dan validasi DTKS dengan melibatkan ruang warga yang seluas-luasnya. Sehingga perlu dipertimbangkan suatu platform yang dapat mengakomodir kelompok rentan tersebut.</li> <li>2. Diperlukan penguatan komitmen dan pengkonkritan proses kokreasi Kemensos dan MediaLink.</li> </ol>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 12

### Implementasi Pendekatan Akuntabilitas Sosial dalam Program Pembangunan Desa

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa di 200 desa percontohan		
<b>Kementerian Desa PDTT</b>		
<b>Target B06:</b> Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para pemangku kepentingan	<b>Capaian Target:</b> Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa telah dilakukan kepada para OMS agar OMS dapat mempelajari kebijakan ini.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) telah melibatkan Seknas FITRA dalam melakukan Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa.</li> <li>2. Kemendesa PDTT juga telah berkoordinasi dengan WVI untuk membagikan konsep Akuntabilitas Sosial.</li> </ol>	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



Target B12:	Capaian Target:	Nilai: 100%
<p>1. Tersusunnya rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa.</p> <p>2. Terlaksananya pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.</p>	<p>1. Telah tersusun rencana pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/KPMD) perihal Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa.</p> <p>2. Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa menggarisbawahi strategi penerapan akuntabilitas sosial di desa yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan partisipasi warga desa, dengan melakukan kaderisasi desa, pengembangan kapasitas literasi, pengembangan kapasitas warga desa;</li> <li>b. Penguatan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, dengan cara mendorong keterbukaan informasi, penguatan musyawarah desa, penguatan kepemimpinan desa, serta penyusunan produk hukum yang partisipatif; dan</li> <li>c. Penguatan tata kelola pembangunan desa yang berkeadilan sosial, dengan cara pendataan Sistem Informasi Desa (SID), visi kolektif warga desa, dan perencanaan pembangunan dan anggaran desa untuk SDGs Desa.</li> </ul> <p>4. Masyarakat desa (termasuk KPMD) telah mempelajari akuntabilitas sosial ketika menghadiri sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial.</p>	

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<b>Proses Kokreasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Desa bersama dengan Seknas FITRA telah menyusun Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa sebagai panduan dalam memberikan pembelajaran terkait akuntabilitas sosial di desa.</li> <li>2. Dalam proses penyusunan dan sosialisasi, Kementerian Desa telah aktif melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan OMS mitra OGI seperti WVI dan TII.</li> <li>3. Dengan pelibatan aktif ini, diharapkan daerah binaan OMS akan mendapatkan pembelajaran terkait akuntabilitas sosial berdasarkan panduan yang sama.</li> </ol>	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memahami konsep implementasi akuntabilitas sosial.		
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya pertemuan multi-pihak antara Kementerian/Lembaga	<b>Capaian Target:</b> Pertemuan multi-pihak belum terselenggara dikarenakan akibat refocusing anggaran, sehingga target ini tidak dapat tercapai.	<b>Nilai: 0%</b>

dan Organisasi Masyarakat Sipil terkait implementasi akuntabilitas social.	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS juga tidak dapat mengikuti pertemuan multipihak karena pertemuan tidak terlaksana.	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> Fasilitasi untuk sosialisasi dan bimbingan teknis bagi Kepala Desa, aparatur pemerintah desa, dan BPD.	<b>Capaian Target:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan paparan terkait program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang merupakan payung program pelaksanaan akuntabilitas sosial di desa di agenda sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT.</li> <li>2. Paparan tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dan OMS yang hadir dalam Agenda Penguatan P3PD, yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa PDTT.</li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS telah hadir untuk mempelajari akuntabilitas sosial dalam agenda sosialisasi Buku Panduan Fasilitasi Akuntabilitas Sosial yang dilaksanakan oleh Kemendesa PDTT.	<b>Aktif</b>
<b>OMS</b>		
<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Terselenggaranya pemantauan pembangunan desa berbasis masyarakat untuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan desa.		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B06:</b>  1. Sosialisasi Kebijakan Akuntabilitas Sosial dalam Pembangunan Desa kepada para masyarakat dan pemerintahan desa.  2. Terlaksananya pertemuan multipihak antara Kementerian/Lemaba dan OMS terkait implementasi akuntabilitas social.	<b>Capaian Target:</b>  OMS telah berpartisipasi dalam sosialisasi serta pertemuan multipihak yang ada.  <b>Proses Kokreasi:</b>  OMS (Fitra, TII dan WVI) telah melakukan sosialisasi kebijakan akuntabilitas dan berkoordinasi dengan Kemendesa PDTT.	<b>Nilai: 100%</b>    <b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b>  1. Tersusunnya panduan operasional terkait Akuntabilitas Sosial bagi masyarakat desa dan pemerintahan	<b>Capaian Target:</b>  WVI merupakan OMS yang aktif terlibat dan hadir dalam bimtek yang diadakan oleh Kementerian Desa PDTT. Kerangka operasional yang telah dikumpulkan adalah manifestasi dari hasil pembelajaran dari Kementerian Desa dan pengalaman WVI di desa dampingan.	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p>desa untuk meningkatkan pelayanan di desa.</p> <p>2. Asistensi pembelajaran bagi masyarakat desa (termasuk KPMD) dan pemerintahan desa perihal akuntabilitas sosial dalam pembangunan Desa.</p>	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>WVI merupakan OMS yang aktif terlibat dan hadir dalam bimtek yang diadakan oleh Kementerian Desa PDTT. Kerangka operasional yang telah dikumpulkan adalah manifestasi dari hasil pembelajaran dari Kementerian Desa dan pengalaman WVI di desa dampingan.</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p> <p>Perlu adanya <i>knowledge repository</i> terkait pelaksanaan implementasi akuntabilitas sosial di daerah yang telah dilakukan OMS dan Kementerian Desa PDTT sebagai bahan pembelajaran dan evaluasi.</p>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

### Komitmen 13

## Penguatan Ekosistem Keterbukaan Data Pemilu untuk Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilu

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format terbuka (open data) dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).		
<b>KPU</b>		
<b>Target B06:</b> Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	<b>Capaian Target:</b> KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.	<b>Nilai:</b> <b>0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	<b>Capaian Target:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah terdapat sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi penyelenggaraan pemilu dalam format Open Data KPU.</li> <li>2. KPU telah melaksanakan Launching Open Data di Ruang rapat Kantor KPU RI pada tanggal 29 September 2021.</li> <li>3. KPU sudah mulai responsif dalam komunikasi terkait progres. Sekretariat OGI mengupayakan grup bersama KPU dengan Perludem.</li> </ol>	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



	<b>Proses Kokreasi:</b> KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan <i>platform</i> Open Data KPU.	Aktif
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Terselenggaranya uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.		
KPU		
<b>Target B06:</b> Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	<b>Capaian Target:</b> KPU tidak mengumpulkan data dukung hingga akhir masa verifikasi.	Nilai: 0%
	<b>Proses Kokreasi:</b> Koordinasi antara KPU dan Perludem masih terhambat karena belum ada PoC KPU untuk RAN OGI.	Pasif
<b>Target B12:</b> Integrasi rencana aksi dalam dokumen perencanaan KPU.	<b>Capaian Target:</b> KPU telah melaksanakan uji coba penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS dengan tujuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menginventarisasi permasalahan yang muncul dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di TPS oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).</li> </ol>	Nilai: 100%

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>2. Melakukan sosialisasi kepada petugas KPPS serta jajaran satker KPU daerah dan masyarakat terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP).</p> <p>3. Mengukur berbagai macam bentuk penulisan dari beberapa petugas KPPS dalam formulir Plano agar dapat disesuaikan dan diukur hasil akurasi pembacaan sistem terhadap tulisan Uji coba Aplikasi Sirekap dilakukan di beberapa daerah, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor KPU.</li> <li>Kota Depok.</li> <li>Bandung.</li> <li>Kota Magelang.</li> <li>Seluruh wilayah yg menyelenggarakan Pilkada 2020 (menjelang hari H, sesuai surat No 669).</li> </ol> <p>KPU sudah responsif dalam komunikasi terkait progres, walaupun masih ada silo dalam departemen. Sekretariat OGI mengupayakan grup bersama KPU dengan Perludem. Namun, yang melakukan pelaporan dari KPU adalah biro lainnya.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>KPU telah menerima audiensi dari Perludem mengenai peningkatan rekapitulasi elektronik.</p>	Aktif
PERLUDEM		
Ukuran Keberhasilan 1:		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Tersedianya sistem informasi penyelenggaraan pemilu yang terintegrasi dan portal pusat publikasi informasi penyelenggaraan pemilu dalam format data terbuka.		
<b>Target B06:</b>  Tersedianya kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia.	<b>Capaian Target:</b>  Perludem telah membuat kajian ekosistem keterbukaan data pemilu Indonesia dan sudah disampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu DPR RI.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  1. Hasil kajian belum disampaikan ke KPU. 2. Highlight Kajian: Unsur ekosistem <i>civic tech</i> yang berhasil dengan rating hijau diantaranya kepemimpinan dan komitmen politik, keterlibatan dan kapabilitas warga, dan dukungan anggaran.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b>  Tersedianya kajian tentang ketersediaan data pemilu dan rekomendasi strategi digitalisasi menjadi format data terbuka.	<b>Capaian Target:</b>  Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekosistem <i>civic tech</i> dan data pemilu terbuka di Indonesia cukup baik dengan masyarakat sipil dan teknologi pemilu warga yang ada dan komitmen penyelenggara pemilu untuk menyediakan data pemilu terbuka.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  1. Komunikasi KPU dan Perludem belum optimal sehingga pelaksanaan Capaian Target dilakukan masing-masing tanpa adanya koordinasi. Contact person dari KPU bukan dari divisi yang secara langsung mengimplementasi renaksi.	<b>Semi Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	Sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi, koordinasi antar lembaga (sekretariat OGI, KPU, dan Perludem) belum optimal.	
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b> Terselenggarakannya kajian akademik terkait uji coba berulang rekapitulasi elektronik di beberapa daerah sebagai program percontohan pengelolaan data hasil pemilu yang cepat, transparan, dan akuntabel.		
<b>Target B06:</b> Tersedianya rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.	<b>Capaian Target:</b> Perludem telah menyusun rekomendasi pengaturan rekapitulasi elektronik untuk revisi UU Pemilu.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Catatan telah disampaikan ke Baleg DPR RI dan Panja RUU Pemilu DPR RI namun belum disampaikan ke KPU.</li> <li>2. Highlight Kajian: Unsur ekosistem <i>civic tech</i> yang berhasil dengan rating hijau diantaranya kepemimpinan dan komitmen politik, keterlibatan dan kapabilitas warga, dan dukungan anggaran.</li> </ol>	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Tersedianya kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik.	<b>Capaian Target:</b> Telah tersedia kajian tentang kesiapan pengelolaan data hasil pemilu melalui sistem rekapitulasi elektronik.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara umum, sebagian besar data kunci pemilu sudah terbuka dan tersedia</li> </ol>	<b>Semi Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>secara online. Namun, data-data tersebut belum bisa secara penuh disebut sebagai open data. Dalam kajiannya, Perludem menuliskan prinsip-prinsip open data.</p> <p>2. Komunikasi KPU dan Perludem belum optimal sehingga pelaksanaan Capaian Target dilakukan masing-masing tanpa adanya koordinasi. <i>Contact person</i> dari KPU bukan dari divisi yang secara langsung mengimplementasi renaksi. Sehingga dalam proses pelaksanaan dan pengawasan rencana aksi, koordinasi antarlembaga (sekretariat OGI, KPU, dan Perludem) belum optimal.</p>	
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan penguatan komitmen dan pengkonkritan proses koreksi KPU dan Perludem.</li> <li>2. Komisi Pemilihan Umum dapat tindaklanjuti atau menerima hasil kajian tersebut ke dalam pengembangan kedepannya.</li> </ol>		

## Komitmen 14

### Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Pengembangan Sistem Keterbukaan Informasi Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Berbasis Data yang dapat diakses oleh publik.		
<b>Kementerian Kesehatan</b>		
<b>Target B06:</b> 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	<b>Capaian Target:</b> 1. Kemenkes telah melakukan uji coba sistem M-Health di 25 Puskesmas wilayah Jabodetabek. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan juga telah terlaksana. Perbaruan data tersebut dapat dilihat dalam surat Kepmenkes No. 4720 Tahun 2021 terkait Data Pusat Kesehatan Masyarakat Terintegrasi.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Dalam melakukan uji coba ini, Kemenkes belum melibatkan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> 1. Uji coba sistem M-Health di beberapa puskesmas. 2. Koordinasi terkait pemetaan dan perbaruan data fasilitas kesehatan.	<b>Capaian Target:</b> 1. Sosialisasi dan implementasi aplikasi MHealth: Pendampingan Piloting Implementasi Aplikasi MHealth untuk seluruh puskesmas di 10 Kabupaten/Kota terpilih: Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kabupate Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Yogyakarta,	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



	<p>Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kota Malang.</p> <p>2. Kegiatan sosialisasi berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Paparan kondisi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) Kabupaten/Kota.</li> <li>Paparan fitur baru aplikasi Keluarga Sehat dan aplikasi MHealth.</li> <li>Pendampingan penggunaan aplikasi MHealth Nakes, Beneficer, dan Intervensi Manajer.</li> </ol> <p>3. Highlight materi sosialisasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aplikasi PIS - PK dan Kekurangan PIS - PK: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tenaga Kesehatan: tidak bisa memantau kondisi keluarga yang telah disurvei</li> <li>Masyarakat: tidak dapat mengetahui status keluarganya dan belum bisa mendapatkan informasi Kesehatan dari faskes terdekat</li> </ul> </li> <li>MHealth: <ul style="list-style-type: none"> <li>mHealth merupakan sebuah layanan yang melakukan integrasi data individu dan keluarga dengan menggunakan PIS – PK sebagai basis data informasi (Satu Data Kesehatan)</li> <li>mHealth bertujuan meningkatkan kualitas dan partisipasi masyarakat dan nakes dalam peningkatan kualitas Kesehatan Indonesia</li> </ul> </li> </ol>	
--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi salah satu fasilitas untuk melakukan koordinasi antara masyarakat dan nakes khususnya dalam implementasi program kesehatan</li> <li>Tersedia MHealth bagi Nakes, Beneficer, dan Intervensi Manajer.</li> </ul> <p>4. Pengembangan MHealth:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Sistem aplikasi mHealth Nakes (web dan mobile).</li> <li>Pengembangan mobile Health Beneficer.</li> <li>Pengembangan integrasi data dengan aplikasi keluarga sehat (PIS - PK).</li> <li>Pengembangan integrasi dengan aplikasi -aplikasi lain terkait Kesehatan.</li> </ol> <p>5. Hasil pemetaan dan perbaruan data fasilitas Kesehatan:</p> <p>Data pendukung terkait target pemetaan dan perbaruan data faskes dapat diunduh melalui Link  <a href="https://link.kemkes.go.id/KMKDATAPUSKESMASDES20">https://link.kemkes.go.id/KMKDATAPUSKESMASDES20</a></p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Telah terjadi dua kali rapat koordinasi antara Kemenkes dan INFID yang diinisiasi oleh INFID dan Sekretariat Nasional OGI.</p>	<b>Aktif</b>
<p><b>INFID</b></p> <p><b>Ukuran Keberhasilan 1:</b></p>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik.		
<b>Target B06:</b>  Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	<b>Capaian Target:</b>  INFID belum melakukan sosialisasi MHealth karena MHealth masih dalam tahap pengembangan.	<b>Nilai: N/A</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  INFID telah memberikan masukan tambahan terkait pengembangan sistem MHealth misalnya dengan menambah fitur untuk melayani kebutuhan seksual dan reproduksi. Masukan ini dapat digunakan Kemenkes untuk mengembangkan aplikasi MHealth ke depannya.	
<b>Target B12:</b>  Terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh publik dengan adanya bantuan materi dan narasumber dari Kementerian Kesehatan.	<b>Capaian Target:</b>  INFID belum melakukan sosialisasi pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi di fasilitas Kesehatan dikarenakan MHealth masih dalam proses pengembangan.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  INFID telah berkoordinasi dengan Kemenkes dan Seknas OGI terkait: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diskusi untuk memetakan inisiatif dan mendorong pelayanan informasi kesehatan seksual dan reproduksi yang mudah diakses oleh publik, khususnya dalam masa pandemi COVID-19.</li> <li>2. Saat ini, MHealth masih dalam tahap pengembangan sehingga beberapa</li> </ol>	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>diskusi menghasilkan beberapa tindak lanjut diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Para pihak sepakat untuk mengembangkan fitur demand side dalam MHealth dan apabila diperlukan melakukan diskusi terfokus agar lebih responsif kebutuhan kelompok rentan.</li> <li>b. Memastikan dan mengintegrasikan aplikasi yang akan didorong karena ada beberapa fitur mengenai kesehatan ibu dan anak di aplikasi yang berbeda yaitu pedulilindungi, telemedicine, MHealth, dan MKia.</li> </ol> <p>3. Strategi percepatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan rapat koordinasi pada Bulan Januari 2022 untuk mengetahui perkembangan sistem MHealth dan potensi integrasi aplikasi mengenai kesehatan ibu dan anak yang sudah dikembangkan.</li> <li>b. Melakukan Webinar/Podcast/konten sosial media ataupun webinar mengenai MHealth/aplikasi terkait dan relevansinya dalam mendorong kesehatan seksual dan reproduksi yang lebih baik di masa pandemik.</li> </ol>	
<p><b>Tindak Lanjut:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil rapat koordinasi menetapkan bahwa INFID akan melakukan sosialisasi terkait M-KIA sebagai aplikasi yang mendorong layanan Kesehatan Reproduksi yang interaktif.</li> <li>2. Kementerian Kesehatan sedang berupaya menambahkan fitur layanan Kesehatan Seksual Reproduksi di M-Health serta mendorong adanya layanan Kesehatan Produksi di <i>Citizen Health</i>.</li> </ol>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 15

### Penguatan Portal Informasi terkait Anggaran COVID-19

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di daerah (dalam APBD) yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.		
<b>Kementerian Dalam Negeri</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya pengembangan portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19.	<b>Capaian Target:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Dalam Negeri telah memiliki portal informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang dapat diakses publik di <a href="https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2020">https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2020</a>.</li> <li>2. Pengembangan portal informasi dilakukan dengan menambahkan submenu yang khusus menyajikan data anggaran penanganan COVID-19 dalam situs web Kementerian Dalam Negeri.</li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Dalam pelaksanaan UK Kemendagri dan UK Kemenkeu, tidak terjadi proses ko-kreasi dikarenakan tidak adanya partisipasi dari Seknas Fitra selaku OMS mitra dalam memberikan masukan terkait data apa saja yang termasuk dalam portal.	<b>Pasif</b>
<b>Target B12:</b> Tersedianya informasi realisasi	<b>Capaian Target:</b> Telah tersedianya informasi realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19	<b>Nilai: 100%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



<p>anggaran penanganan pandemi COVID19 tahun 2020 (manual).</p>	<p>tahun 2020 (manual). Dapat diakses melalui link berikut:  <a href="https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2021">https://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/8/2021</a></p> <p>Struktur informasi yang disediakan, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahun 2020:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Alokasi dan realisasi pendanaan penanganan covid-19 di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) bulan Oktober 2020.</li> <li>c. Alokasi dan realisasi pendanaan penanganan covid-19 di daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) bulan November 2020.</li> <li>d. Hasil November 2020:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat Provinsi: dari alokasi anggaran sebesar 36,83 T, terserap sebesar 69,80%</li> <li>• Tingkat Kabupaten/Kota: dari alikasi anggaran sebesar 44,30 T, terserap sebesar 50,29%</li> </ul> </li> </ol> </li> <li>2. Tahun 2021:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendanaan penanganan covid-19 dalam APBD Provinsi.</li> <li>b. Pendanaan penanganan covid-19 dalam APBD Kabupaten/Kota.</li> <li>c. Dukungan vaksinasi dalam APBD Provinsi.</li> <li>d. Dukungan vaksinasi dalam APBD Kabupaten/Kota.</li> <li>e. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemik covid-19 APBD Provinsi.</li> <li>f. Dukungan pada Kelurahan dalam rangka penanganan pandemik covid-19 APBD Kabupaten/Kota.</li> <li>g. Hasil per Juni 2021:</li> </ol> </li> </ol>	
---	--	--

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata rata realisasi anggaran penanganan pandemik Covid 19 di Provinsi adalah 6,37%, dengan realisasi tertinggi pada Provinsi Kalimantan Timur sebesar 56,68%</li> <li>• Rata rata realisasi anggaran penanganan pandemik Covid 19 di Kabupaten/Kota adalah 10,15%, dengan realisasi tertinggi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 47,36%</li> </ul>	
	<b>Proses Kokreasi:</b> Kementerian Dalam Negeri belum melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil dalam pengembangan informasi realisasi anggaran Covid-19 di daerah.	<b>Pasif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> UK 1: Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 di tingkat pusat yang telah diaudit melalui portal yang dikembangkan.		
<b>Kementerian Keuangan</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya pengembangan portal informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19.	<b>Capaian Target:</b> Kementerian Keuangan telah memiliki portal informasi yang berisi data ringkasan umum APBN 2020-2021. Namun, capaian administratif hanya mencapai 70 persen dikarenakan belum ada informasi terkait tampilan data yang spesifik mengenai realisasi anggaran penanganan pandemi COVID-19 di	<b>Nilai: 70%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	website Kemenkeu. Sejauh ini rapat koordinasi masih dilakukan untuk pengembangan dan penyediaan raw data.	
	<b>Proses Kokreasi:</b> Kementerian Keuangan telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Seknas Fitra untuk mengembangkan portal anggaran COVID-19.	Aktif
<b>Target B12:</b> Tersedianya informasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 melalui portal yang telah dikembangkan.	<b>Capaian Target:</b> 1. Data terkait realisasi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) dapat diakses pada laman <a href="https://pen.kemenkeu.go.id/">https://pen.kemenkeu.go.id/</a> , dengan struktur informasi: a. Realisasi PEN sementara (progress penyerapan) periode Desember 2021, salah satunya sektor kesehatan b. dengan hasil data per November 2021, untuk sektor Kesehatan terserap 76% 2. Kementerian Keuangan sedang melakukan pengintegrasian data khususnya terkait anggaran dan alokasi PEN di website PC-PEN ( <a href="https://pen.kemenkeu.go.id/">https://pen.kemenkeu.go.id/</a> ) melalui koordinasi internal.	Nilai: 100%
	<b>Proses Kokreasi:</b> Dikarenakan pengintegrasian data bersifat teknis, proses ini tidak melibatkan pihak OMS. Diharapkan kedepannya dapat dilakukan pembahasan terkait kedalaman data yang akan disajikan di portal yang telah terintegrasi.	Aktif
<b>Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)</b>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Terlaksananya kolaborasi pengembangan portal informasi realisasi anggaran pandemi COVID-19 yang komprehensif dan telah diaudit.		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya kajian untuk memberi masukan terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19.	<b>Capaian Target:</b> SEKNAS FITRA sudah menyampaikan kajian terkait pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID-19 kepada Kementerian/Lembaga (K/L) mitra. Terdapat sebuah kajian <i>desk study</i> yang dilaksanakan oleh koalisi OMS yakni Seknas FITRA, TII, IBC, ICW, dan AIPJ2 yang bertajuk "Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya".	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi</b> Hasil dari kajian tersebut adalah untuk pemerintah menaruh fokus besar tidak hanya pada penambahan anggaran penanganan COVID-19 namun juga pada tingkat penyerapannya. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan adanya dokumentasi dan publikasi yang aktual mengenai anggaran penanganan COVID-19 agar potensi penyimpangan anggaran dapat dicegah.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Terlaksananya FGD terkait pengembangan sistem informasi realisasi anggaran penanganan pandemi	<b>Capaian Target:</b> Seknas FITRA telah melaksanakan webinar pada bulan Juni 2021, serta audiensi dengan Kementerian Keuangan pada bulan Juli 2021.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

COVID- 19 tahun 2020.	Diskusi atau FGD berisikan masukan terkait perbaikan tampilan <i>dashboard</i> website PC-PEN serta penyajian data perminggu.	
<b>Tindak Lanjut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan masukan sebagai dasar pengembangan portal informasi anggaran penanganan COVID 19 belum tersedia, baik dari hasil kajian, diskusi terfokus, maupun bentuk lainnya.</li> <li>2. Seknas FITRA perlu dilibatkan dan memberi masukan kepada Kemendagri dalam penyajian data informasi anggaran Covid-19 di daerah.</li> </ol>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

## Komitmen 16

### Pelibatan Masyarakat Sipil Dalam Pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi) Untuk Mendorong Efektivitas Pemulihan Korban Pelanggaran HAM Yang Berat

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU KKR.		
<b>Kementerian Hukum dan HAM</b>		
<b>Target B06:</b> Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.	<b>Capaian Target:</b> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melibatkan masyarakat sipil dalam beberapa kegiatan sejak tahun 2020, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan substansi RUU KKR, tetapi ELSAM (unsur masyarakat) tidak dapat hadir.</li> <li>Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Profesor Harkristuti Harkrisnowo.</li> <li>Rapat grand design penanganan peristiwa pelanggaran HAM, unsur masyarakat yang hadir adalah Professor Jimly Asshiddiqie.</li> <li>Perumusan kebijakan penanganan peristiwa HAM berat, yang menjadi unsur masyarakat adalah Professor Asvi Warman Adam. Kementerian Hukum dan HAM juga telah melakukan audiensi bersama KONTRAS dan korban peristiwa pelanggaran HAM berat untuk membahas RUU KKR serta penanganan dari peristiwa HAM berat.</li> </ol>	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Kementerian Hukum dan HAM telah mengundang unsur non-pemerintah (OMS dan akademisi) dalam bentuk FGD untuk menjaring pendapat terkait perumusan RUU KKR.	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



<p><b>Target B12:</b></p> <p>Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Direktorat Jenderal HAM telah menyusun instrumen HAM berupa Kajian Substansi Rancangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) bersama IKOHI untuk menjawab permasalahan yang ada serta sebagai upaya konkret Pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Sebagai bukti nyata upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat ini, Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 21 Oktober 2021 telah mengirimkan permohonan Izin Prakarsa Penyusunan RUU KKR kepada Presiden, yang diharapkan akan menjadi langkah upaya Pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat melalui mekanisme non yudisial dalam bentuk upaya pemulihan dan rekonsiliasi untuk kepentingan para korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM yang berat.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Kementerian Hukum dan HAM telah melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yaitu Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI).</p>	<p><b>Aktif</b></p>
<p><b>OMS Sektor Keadilan</b></p>		
<p><b>Ukuran Keberhasilan 1:</b></p> <p>Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.</p>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B06:</b> Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik, dan RUU KKR.	<b>Capaian Target:</b> Dirjen HAM belum melibatkan OMS Sektor Keadilan yang tergabung di RAN OGI.	<b>Nilai: N/A</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> PBHI menyampaikan masukan terkait RUU KKR di forum diskusi publik, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong adanya dukungan penegakan hukum.</li> <li>b. Mendorong lahirnya RUU KKR dengan proses pembahasan yang transparan dan pelibatan masyarakat yang aktif.</li> <li>c. Mendukung adanya bantuan lain selain LPSK (Bantuan Medis, Psikis, Psikososial, dll.) bagi korban pelanggaran HAM.</li> </ul>	<b>N/A</b>
<b>Target B12:</b> Tersedianya naskah akademik dan RUU KKR yang sudah disampaikan kepada Presiden dan dapat diakses publik.	<b>Capaian Target:</b> OMS Sektor Keadilan tidak mengumpulkan data dukung untuk target semester dua. Selain itu, keterlibatan OMS Sektor Keadilan tidak dapat tergambarkan dalam Data Dukung Kementerian Hukum dan HAM.	<b>Nilai: 0%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> OMS Sektor Keadilan tidak mengumpulkan data dukung untuk target semester dua. Selain itu, OMS Sektor Keadilan tidak dilibatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.	<b>N/A</b>
<b>Tindak Lanjut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diperlukan penguatan komitmen dan kesepakatan bersama terkait proses kokreasi Kemenkumham dan OMS Sektor Keadilan.</li> </ol>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

2. Mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam penyusunan RUU KKR di Kementerian Hukum dan HAM.

### Komitmen 17

#### Keterbukaan Data Beneficial Ownership (BO) (Website Stranas U Lihat Laporan Belum Bisa Dibuka U Cari Data)

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya basis data yang berisikan penerima manfaat yang telah terintegrasikan dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.		
<b>Stranas PK</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya sosialisasi, termasuk publikasi, atas kewajiban penyampaian informasi data BO Korporasi.	<b>Capaian Target:</b> Jumlah korporasi aktif sampai B06 2.262.080 sementara yg mendeklarasi BO 478.022 (21,13%).	<b>Nilai: 21%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Melibatkan Publish What You Pay (PWYP) dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<b>Target B12:</b>  1. Adanya kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan tingkat resiko terjadinya Tipikor, TPPU, TPPT, Pidana Perpajakan dan kerusakan SDA. 2. Adanya input dari K/L pelaksana atas kriteria mitigasi resiko dan peta korporasi berdasarkan tingkat resiko terjadinya Tipikor, TPPU, TPPT, Pidana Perpajakan dan kerusakan SDA.	<b>Capaian Target:</b>  1. Berdasarkan data KemenkumHAM, korporasi yang telah mendeklarasi BO adalah 478.022 (21,13%) atau bertambah sebesar 1,99% dari periode B03, 539.622 (23,12%).  2. Salah satu kendala rendahnya penambahan ini karena belum ada satupun sistem basis data yang dikembangkan K/L yang telah terintegrasi dengan sistem basis data di KemenkumHAM.	<b>Nilai: 23%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b>  Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 2:</b>  Terbukanya akses publik terhadap basis data yang berisikan penerima manfaat.		
<b>Stranas PK</b>		
<b>Target B06:</b>  Adanya pemetaan dan penetapan	<b>Capaian Target:</b>  Jumlah akses layer publik belum menunjukkan perkembangan.	<b>Nilai: 1%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

layering informasi data BO yang dapat diakses public.	<b>Proses Kokreasi:</b> Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Adanya fitur kanal akses publik pada sistem basis data BO yang dilengkapi dengan identitas dan rencana pemanfaatan oleh pengguna.	<b>Capaian Target:</b> Jumlah akses layer publik pada B12 sudah mencapai 11,4%.	<b>Nilai: 1%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian.	<b>Aktif</b>
<b>Ukuran Keberhasilan 3:</b> Termanfaatkannya data BO yang sesuai dengan kebutuhan aparat penegak hukum, perizinan, dan pengadaan barang/jasa.		
<b>Stranas PK</b>		
<b>Target B06:</b> Adanya pemetaan dan penetapan layering informasi data BO yang akan digunakan oleh Aparat Penegak	<b>Capaian Target:</b> Jumlah layer akses APH untuk kebutuhan penegakan hukum belum ada progress.	<b>Nilai: 1%</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

Hukum (APH) dalam rangka penanganan perkara.	<b>Proses Kokreasi:</b> Melibatkan PWYP dalam sosialisasi sampai dengan penyusunan Kajian	<b>Aktif</b>
<b>Target B12:</b> Adanya fitur kanal akses pada sistem basis data BO yang dapat oleh APH, termasuk APIP dalam rangka penanganan perkara	<b>Capaian Target:</b> Jumlah layer akses APH untuk kebutuhan penegakan hukum mencapai progress sebesar 17%	<b>Nilai: 4%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Melibatkan PWYP dalam diskusi pengembangan fitur kanal akses pada sistem basis data BO	<b>Aktif</b>
<b>PWYP</b>		
<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Adanya keterlibatan dan peran aktif Masyarakat Sipil dalam setiap tahapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, baik dalam pencapaian: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya basis data BO.</li> <li>2. Terbukanya akses data BO kepada Publik.</li> <li>3. Termanfaatkannya data BO oleh Masyarakat Sipil, APH maupun K/L.</li> </ol>		
<b>Target B06:</b> 1. Adanya kajian keterbukaan data BO. 2. Adanya panduan memahami BO dan Pemetaan Kepemilikan	<b>Capaian Target:</b> PWYP telah membantu menyusun Panduan Memahami BO serta Pemetaan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA. Kajian sudah diselesaikan sejak B06.	<b>Nilai: 100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> PWYP aktif berkoordinasi dengan Stranas – PK dan membantu mengawal keterbukaan data BO	<b>Aktif</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia



Korporasi Sektor SDA.	dengan menyusun kajian terkait keterbukaan data BO.	
<b>Target B12:</b> Adanya sosialisasi dan pelatihan untuk CSO dan/atau komunitas dalam memahami BO dan Memetakan Kepemilikan Korporasi Sektor SDA.	<b>Capaian Target:</b> PWYP telah membuat webinar-webinar, serta bentuk sosialisasi lainnya (konten sosial media) terkait BO.	<b>Nilai:</b> <b>100%</b>
	<b>Proses Kokreasi:</b> Namun pemerintah belum menemukan titik temu terkait data BO yang dapat diakses kepada publik.	<b>Aktif</b>
<b>Tindak Lanjut:</b> Berkoordinasi lebih intensif dengan Stranas PK dalam menemukan solusi atas keterbukaan data BO.		

## Komitmen 18

### Jaminan Keterbukaan Ruang Kewargaan

<b>Ukuran Keberhasilan 1:</b> Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.
<b>Kementerian PPN/Bappenas</b>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

<p><b>Target B06:</b></p> <p>Penelitian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restorative.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Direktorat Hukum dan Regulasi telah melakukan penelitian yang hasilnya diharapkan dapat rekomendasi kebijakan penerapan keadilan restoratif dan menyatukan persepsi mengenai keadilan restoratif antar penegak hukum.</p> <p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Direktorat Hukum dan Regulasi bersama konsorsium masyarakat sipil (ICJR, IJRS, dan LeIP) melakukan berbagai rapat dan wawancara dengan K/L terkait dalam melaksanakan penelitian tersebut.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p> <p><b>Aktif</b></p>
<p><b>Target B12:</b></p> <p>Tersedianya roadmap terkait Keadilan Restoratif.</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Telah tersedia peta jalan terkait keadilan restoratif yang menjabarkan 9 aspek yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Definisi, Ruang Lingkup dan Mekanisme Pelaksanaan RJ.</li> <li>2. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP.</li> <li>3. Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHAP.</li> <li>4. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan pemenuhan hak bagi penyalahguna narkoba.</li> <li>5. Mekanisme Diversi Pada Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak (UU SPPA).</li> <li>6. Penguatan Substansi dan Kesiapan Implementasi Ketentuan RKUHP yang Mendukung Keadilan Restoratif.</li> </ol>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

	<p>7. Penguatan Substansi dan Kesiapan Implementasi Ketentuan RKUHAP yang Mendukung Keadilan Restoratif.</p> <p>8. Pemulihan Korban Berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban (Pelanggaran HAM yang berat, terorisme, perdagangan orang, penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat), UU Perlindungan Anak, dan UU TPPO.</p> <p>9. Penguatan Peran Penelitian Kemasyarakatan.</p>	
	<p><b>Proses Kokreasi:</b></p> <p>Bappenas telah melakukan kokreasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil OGI, dalam bentuk jejaring pendapat dan juga menerima masukan hasil kajian dari IJRS.</p>	<b>Aktif</b>
<b>OMS Sektor Keadilan</b>		
<p><b>Ukuran Keberhasilan 1:</b></p> <p>Tersedianya hasil penelitian dan Roadmap mengenai keadilan restoratif terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi dalam blueprint keadilan restoratif.</p>		
<p><b>Target B06:</b></p> <p>Tersedianya kajian mengenai mekanisme</p>	<p><b>Capaian Target:</b></p> <p>Telah menyusun kajian bersama dengan Kementerian Bappenas.</p>	<p><b>Nilai: 100%</b></p>

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia

penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	<b>Proses Kokreasi:</b> Kajian mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	Aktif
<b>Target B12:</b> Tersedianya kajian dan rekomendasi mengenai mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap perkara pidana yang terkait hak informasi, hak berekspresi, serta hak berkumpul dan berorganisasi.	<b>Capaian Target:</b> Walaupun OMS tidak mengumpulkan data dukung, kontribusi OMS tergambar dalam data dukung yang diberikan Bappenas.	Nilai: 100%
	<b>Proses Kokreasi:</b> Walaupun OMS tidak mengumpulkan data dukung, keterlibatan OMS tergambar dalam data dukung yang diberikan Bappenas.	Aktif
<b>Tindak Lanjut:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Partisipasi aktif OMS Sektor Keadilan dalam mengumpulkan data dukung kepada Sekretariat OGI</li> <li>2. OMS perlu memastikan masukan yang telah disusun dapat diakomodir oleh Bappenas</li> </ol>		

Saran dan masukan dapat disampaikan ke Sekretariat Nasional Open Government Indonesia